

**ANALISIS KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTAR PROVINSI DI
SUMATERA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Ekonomi Pembangunan (S.E)*



Oleh:

Nama : FAJAR ATH THARIQSYAH LUBIS

NPM : 1905180017

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : FAJAR ATH THARIQSYAH LUBIS
NPM : 1905180017
Jurusan : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : ANALISIS KETIMPANGAN PANDAPATAN ANTAR
PROVINSI DI SUMATERA

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I



(Dr. SYLVIA VIANTY RANITA, S.E., M.Si.)

Penguji II



(Dr. RITA HANDYANI, SE.I., M.Si)

Pembimbing



(Dra. LAILAN SAFINA HASIBUAN, M.Si)

Panitia Ujian

Ketua



(Dr. H. JANURI, SE, MM, M.Si)



Sekretaris



(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, SE, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : FAJAR ATH THARIQSYAH LUBIS

NPM : 1905180017

Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN

Alamat Rumah : JL. BRIGJEN KATAMSO GG. SENTOSA NO. 3A

Judul : ANALISIS KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTAR
PROVINSI DI SUMATERA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, September 2023

Pembimbing Skripsi

Dra. LAILAN SAFINA HASIBUAN, M.Si.

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si.

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



Dr. H. JANURI, SE., MM., M.Si., CMA.

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : FAJAR ATH THARIQSYAH LUBIS
N.P.M : 1905180017
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Alamat Rumah : JL. BRIGJEN KATAMSO GG. SENTOSA NO. 3A
Judul Skripsi : ANALISIS KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTAR PROVINSI DI SUMATERA .

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
25-08-2023	- Masukkan data dan analisis tte provinsi di P. Sumatera	} Lu	
	- Beri alasan dan analisis mengapa kel dan pengeluaran mempengaruhi ketimpangan tte.		
31-08-2023	- Masukkan hasil print out aali numej data	} Lu	
	- Analisis mengapa hasilnya seperti itu dan kerjakan dgn teori dan penelitian terdahulu		
	- Perbaiki kesimpulan dan saran.		
08-09-2023	- Buat abstrak	} Lu	
	- Perbaiki kesalahan ² penyederhana		
	- Rapikan penyederhana		
12-09-2023	Telah selesai diperbaiki dan tertera untuk sedang skripsi	} Lu	

Pembimbing Skripsi

Dra. LAILAN SAFINA HASIBUAN, M.Si.

Medan, September 2023

Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, S.E., M.Si.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Lengkap : FAJAR ATH THARIQSYAH LUBIS

N.P.M : 1905180017

Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN

Judul Skripsi : ANALISIS KETIMPANGAN PANDAPATAN ANTAR
PROVINSI DI SUMATERA

Dengan ini menyatakan bawah skripsi saya yang berjudul “Analsis Ketimpangan Pandapatan Antar Provinsi di Sumatera, bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

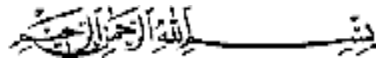
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan



FAJAR ATH THARIQSYAH LUBIS

KATA PENGANTAR



Assalamua'laikum Warrahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT dengan segala rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini yang berjudul “**ANALISIS KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTAR PROVINSI DI SUMATERA**”

Shalawat berangkaikan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, karena telah membawa kita semua dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan sekarang ini.

Penulisan proposal ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selama penyusunan proposal ini, penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan serta doa yang tidak henti-hentinya dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. **ALLAH SWT** yang telah memberikan Rahmat serta, Rezky-Nya yang luar biasa serta nikmat Iman dan nikmat Kesehatan kepada penulis. Dan atas izin-Nya yang memberikan kesempatan kepada penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Yang teristimewa kedua orang tua penulis, Ayah dan Bunda yang telah memberikan segala kasih sayang, do'a, perhatian, pengorbanan dan semangat kepada penulis.

3. Bapak Dr. H. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak H. Januri, SE., M.M, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ade Gunawan SE., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung SE., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Dr. Prawidya Hariani R.S., SE, M.Si selaku Ketua Program Studi EkonoI Pembangunan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Dra. Roswita Hafni., M.Si selaku sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Ibu Dra. Lailan Safina Hasibuan., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing penulis dalam masalah perkuliahan..
10. Ibu selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan proposal ini.
11. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan atas ilmu dan pembekalan yang diberikan kepada penulis selama melaksanakan studi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
12. Seluruh Staff/Pegawai Biro Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu penulis dalam hal administrasi.

13. Teman-teman kelas A Ekonomi Pembangunan, dan kelas Konsentrasi PPD yang semuanya tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan kalian semua.
14. Sahabat-sahabat pejuang skripsi khususnya stambuk 19 yang telah memotivasi dalam penyelesaian proposal ini.

Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang telah membaca proposal ini demi perbaikan-perbaikan kedepannya dan untuk penyempurnaan proposal ini dimasa yang akan datang. Semoga proposal ini dapat menambah dan memperluas pengetahuan terutama bagi penulis dan pembaca lainnya.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga proposal ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua bantuan yang diberikan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, September 2023

FAJAR ATH THARIQSYAH LUBIS
1905180017

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan analisis deskriptif tentang ketimpangan pendapatan antar propinsi di Pulau Sumatera dan mengestimasi faktor yang mempengaruhi pendapatan antar propinsi di Pulau Sumatera. Penelitian yang dilakukan adalah dengan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis Regresi Data Panel. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Rata-rata *Gini Ratio* provinsi di pulau Sumatera masih berada di bawah angka 0,5 dan pada Indeks kemiskinan provinsi Aceh menjadi provinsi dengan indeks kemiskinan cukup tinggi. Jumlah Penduduk dan Tingkat Pengangguran Terbuka Tidak berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan, Namun Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dan Pendidikan memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan.

Kata Kunci : Pulau Sumatera, Kemiskinan, Pengangguran, Penduduk dan Pendidikan

ABSTRACT

The aim of this research is to conduct a descriptive analysis of income inequality between provinces on Sumatra Island and estimate the factors that influence income between provinces on Sumatra Island. The research carried out was a descriptive method with a quantitative approach using Panel Data Regression analysis techniques. The results of this research state that the average Gini Ratio of provinces on the island of Sumatra is still below 0.5 and on the poverty index the province of Aceh is a province with a fairly high poverty index. The population and the level of open unemployment do not have a significant effect on income inequality, however, economic growth has a positive and significant effect on income inequality and Education has a negative influence on income inequality.

Keywords: Sumatra Island, Poverty, Unemployment, Population, and Education

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	12
1.3. Batasan Masalah	12
1.4. Rumusan masalah	13
1.5. Tujuan Penelitan	13
1.6. Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1. Landasan Teori.....	15
2.1.1 Pembangunan Ekonomi	15
2.1.2 Teori Pembangunan Ekonomi	15
2.1.3 Ketimpangan Ekonomi.....	16
2.2 Pengertian Pendapatan	19
2.2.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan	22
2.2.2 Pengertian Distribusi Pendapatan.....	25
2.2.3 Faktor Yang Menyebabkan Ketidakmerataan Distribusi Pendapatan.....	26
2.3 Ketimpangan Pembangunan	29
2.3.1 Pengukuran Ketimpangan Pembangunan.....	30
2.3.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi	32
2.4 Kependudukan	33
2.5 Pengangguran.....	44
2.6 Pertumbuhan penduduk.....	47
2.7 Penelitian Terdahulu	49
2.8 Kerangka Pemikiran.....	51
2.9 Kerangka konseptual model estimasi.....	52
2.10 Hipotesis	52
BAB III METODE PENELITIAN.....	53

3.1 Pendekatan penelitian	53
3.2 Definisi Operasional	53
3.3 Tempat Dan Waktu Penelitian	54
3.3.1 Tempat Penelitian	54
3.3.1 Waktu Penelitian.....	54
3.4 Sumber dan Jenis Data.....	54
3.4.1 Sumber Data	54
3.4.2 Jenis Data.....	54
3.5 Tempat Pengumpulan Data.....	54
3.6 Teknik Analisis Data.....	55
3.6.1 Analisis Data Panel	55
3.6.2 Metode Regresi Data Panel	56
3.6.3 Pemilihan Data Panel	57
3.6.4 Uji Asumsi Klasik	58
3.6.5 Model Estimasi.....	60
3.6.6 Uji Hipotesis.....	61
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	63
4.1 Gambaran Umum Daerah Peneltian	63
4.2 Hasil Penelitian	67
4.2.1 Ketimpangan Pendapatan Antar Provinsi di Pulau Sumatera	67
4.2.2 Hasil Penelitian Faktor Yang Meyebabkan Ketimpangan Pendapatan Antar Provinsi Di Pulau Sumatera.....	71
4.3 Pembahasan.....	80
4.3.1 Ketimpangan Pendapatan Antar Provinsi di Pulau Sumatera	80
4.3.2 Faktor Yang Meyebabkan Ketimpangan Pendapatan Antar Provinsi Di Pulau Sumatera	81
BAB V PENUTUP.....	84
5.1 Kesimpulan	84
5.2 Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Gini Ratio Menurut Provinsi Tahun 2018-2022	3
Tabel 1.2 Laju Perekonomian Indonesia.....	7
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Provinsi indonesia 2018-2022.....	9
Tabel 1.4 Jumlah Pengangguran Terbuka.....	10
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel Model Ekonometrika	54
Tabel 4.1 Metode Regresi Data Panel	71
Tabel 4.2 Pemilihan Regresi Data Panel.....	72
Tabel 4.3 Uji Multikolinearitas	73
Tabel 4.4 Uji Heterokedstisitas	74
Tabel 4.5 Regresi Linear dengan Data Panel.....	75
Tabel 4.6 Uji Simultan (F)	78
Tabel 4.7 Uji Koefisien Determinasi	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2. Kurva <i>Lorenz</i>	19
Gambar 2.4 kerangka konseptual.....	51
Gambar 2.5 Bagan Kerangka Model Estimasi.....	52
Gambar 3.1 Uji t-hitung.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan menjadi salah satu proses kegiatan yang sangat penting bagi setiap negara, karena pada era globalisasi sekarang yang diiringi dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan pembangunan ekonomi tidak hanya berdampak pada bidang ekonomi saja tetapi juga berdampak pada bidang-bidang lain seperti sosial, budaya, politik dan lainnya. Pembangunan merupakan proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan pertumbuhan penduduk disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara yang semakin baik atau mapan (Hasyim, 2016).

Proses pembangunan pada suatu negara menurut Goulet (dikutip dalam Todaro & Smith, 2013) paling tidak terdapat tiga komponen dasar atau nilai-nilai inti yang berfungsi sebagai basis konseptual dan pedoman praktis untuk memahami makna pembangunan yang paling hakiki. Ketiga nilai ini meliputi kecukupan (sustenance), harga diri (self-esteem) dan kebebasan (freedom). Ketiga komponen ini sangat erat kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan yang fundamental ataupun yang mendasar bagi kehidupan manusia.

Pembangunan ekonomi sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Menurut para ekonom (dikutip dalam Hasyim, 2016) pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana

kegiatan perekonomian dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dalam suatu periode tertentu.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari lima pulau utama, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Walaupun Indonesia memiliki sebuah program pembangunan nasional yang sama namun, tetap saja daerah-daerah tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam proses pembangunan ekonomi di wilayahnya. Permasalahan pembangunan ekonomi juga tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi. Pulau Sumatera merupakan pulau terbesar ketiga di Indonesia yang memiliki sepuluh provinsi dengan karakteristik yang berbeda satu sama lain, mulai dari kandungan sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal dan lainnya.

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah dengan arah yang negatif. Artinya semakin tinggi pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan kapasitas produksi sehingga output juga meningkat. Bertambahnya output akan menambah pendapatan masyarakat dan meningkatkan pendapatan perkapita dan selanjutnya ketimpangan pendapatan antar wilayah akan semakin mengecil. Hal ini juga dapat dijelaskan melalui mekanisme pusat pertumbuhan di mana pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat membawa pengaruh bagi daerah lain baik dari sisi positif maupun sisi negatif. Jika pertumbuhan di suatu daerah menyebabkan perbedaan antara ke dua daerah tersebut semakin menyempit berarti terjadi imbas yang baik (positif) karena terjadi proses penetesanan ke bawah (*trickling down effect*), sedangkan jika perbedaan antara kedua daerah tersebut semakin jauh berarti terjadi imbas yang kurang baik (negatif) karena terjadi proses pengkutuban (*polarization effect*) (Kurniasih, 2013)

Terdapat 10 (sepuluh) provinsi di Pulau Sumatera yang setiap tahunnya mengalami ketimpangan pendapatan yang dapat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi maupun sebaliknya. Seperti dapat kita lihat indeks gini di 10 (sepuluh) provinsi di Pulau Sumatera.

Tabel 1. 1 Gini Ratio Menurut Provinsi Tahun 2018-2022

No	Provinsi	Rasio Gini				
		2018 (Septem ber)	2019 (Septem ber)	2020 (Septem ber)	2021 (Septem ber)	2022 (Septem ber)
1	Provinsi Aceh	0.318	0.321	0.319	0.323	0.291
2	Provinsi Sumatera Utara	0.311	0.315	0.314	0.313	0.326
3	Provinsi Sumatera Barat	0.305	0.307	0.301	0.3	0.292
4	Provinsi Riau	0.347	0.331	0.321	0.327	0.323
5	Provinsi Jambi	0.335	0.324	0.316	0.315	0.335
6	Provinsi Sumatera Selatan	0.341	0.339	0.338	0.34	0.33
7	Provinsi Bengkulu	0.355	0.329	0.323	0.321	0.315
8	Provinsi Lampung	0.326	0.331	0.32	0.314	0.313
9	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	0.272	0.262	0.257	0.247	0.255
10	Provinsi Kepulauan Riau	0.339	0.337	0.334	0.339	0.325
11	Provinsi DKI Jakarta	0.39	0.391	0.4	0.411	0.412
12	Provinsi Jawa Barat	0.405	0.398	0.398	0.406	0.412
13	Provinsi Jawa Tengah	0.357	0.358	0.359	0.368	0.366
14	Provinsi DI Yogyakarta	0.422	0.428	0.437	0.436	0.459
15	Provinsi Jawa Timur	0.371	0.364	0.364	0.364	0.365
16	Provinsi Banten	0.367	0.361	0.365	0.363	0.377
17	Provinsi Bali	0.364	0.37	0.369	0.375	0.362
18	Provinsi Nusa Tenggara Barat	0.391	0.374	0.386	0.384	0.374
19	Provinsi Nusa Tenggara Timur	0.359	0.355	0.356	0.339	0.34
20	Provinsi Kalimantan Barat	0.325	0.318	0.325	0.315	0.311
21	Provinsi Kalimantan Tengah	0.344	0.335	0.32	0.32	0.309
22	Provinsi Kalimantan Selatan	0.34	0.334	0.351	0.325	0.309
23	Provinsi Kalimantan Timur	0.342	0.335	0.335	0.331	0.317
24	Provinsi Kalimantan Utara	0.304	0.292	0.3	0.285	0.27
25	Provinsi Sulawesi Utara	0.372	0.376	0.368	0.359	0.359
26	Provinsi Sulawesi Tengah	0.317	0.33	0.321	0.326	0.305
27	Provinsi Sulawesi Selatan	0.388	0.391	0.382	0.377	0.365
28	Provinsi Sulawesi Tenggara	0.392	0.393	0.388	0.394	0.366
29	Provinsi Gorontalo	0.417	0.41	0.406	0.409	0.423
30	Provinsi Sulawesi Barat	0.366	0.365	0.356	0.366	0.371
31	Provinsi Maluku	0.326	0.32	0.326	0.316	0.306
32	Provinsi Maluku Utara	0.336	0.31	0.29	0.278	0.309
33	Provinsi Papua Barat	0.391	0.381	0.376	0.374	0.384
34	Provinsi Papua	0.398	0.391	0.395	0.396	0.393
	Indonesia	0.405	0.380	0.385	0.381	0.381

Sumber : bps.go.id ,2023

Dari gambar 1.1 dapat dilihat bahwa selama periode 2018-2022 tingkat ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera berada pada tingkat ketimpangan rendah. Dimana di masing-masing provinsi di Pulau Sumatera rasio indeks gini ,dimana pada kriteria ini tingkat ketimpangan berada pada ketimpangan rendah.

Tingkat ketimpangan di provinsi di Pulau Sumatera ada di provinsi Kepulauan Bangka yang di ukur dari *gini rasio* mencapai 0.255% yang termasuk dalam kategori ketimpangan sedang Dan provinsi yang memiliki tingkat ketimpangan paling tinggi di Pulau Sumatera adalah provinsi jambi yang di ukur dari *gini rasio* mencapai 0,335% ,Sedangkan di indonesia sendiri pada periode 2018 mencapai 0.405 %dan periode 2022 mengalami penurunan 0.381% .

Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya adalah cerminan peningkatan kapasitas berkelanjutan dari output potensial yang dapat diukur melalui peningkatan Produk Domestik Bruto riil selama periode tertentu dan juga menumbuhkan populasi dan meningkatkan kapasitas produksi suatu komoditas dan meningkatkan jas per capita (El-Seoud, 2014; Kuznets, 2013).

Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan positif pada tingkat produksi barang dan jasa yang dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah dan modal yang akan berubah sesuai dengan berjalannya waktu (Abdullah et al., 2015). Pertumbuhan ekonomi juga merupakan indikator utama kemajuan masyarakat dimana pertumbuhan ekonomi diyakini menjadi gambaran bagaimana perekonomian suatu bangsa itu berjalan, dimana setiap negara berusaha mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi untuk memberikan standar kehidupan yang lebih tinggi bagi warganya (Lira & Kalebe, 2015). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan ekonomi adalah citra ekonomi yang sukses di suatu negara, di mana pertumbuhan ekonomi tinggi akan merangsang kebahagiaan masyarakat dan meningkatkan standar hidup di suatu wilayah.

Pertumbuhan Ekonomi adalah suatu proses perubahan perekonomian negara dalam jangka waktu tertentu untuk menuju kondisi ekonomi yang lebih baik.

Pertumbuhan ekonomi identik dengan peningkatan pendapatan produksi yang dapat dilihat dari output yang meningkat melalui kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi diindikasikan apabila kehidupan ekonomi masyarakat menjadi lebih baik. Pada suatu daerah pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari peningkatan terus menerus pada Produk Domestik Regional Bruto di suatu Provinsi, Kabupaten atau Kota.

Masalah pertumbuhan ekonomi adalah masalah global yang dihadapi oleh setiap negara, tidak hanya negara berkembang yang memiliki masalah pertumbuhan ekonomi. Faktanya negara maju pun masih harus menghadapi permasalahan yang sama yaitu pertumbuhan ekonomi. Masalah ketimpangan dan ketidakmerataan dan pengangguran merupakan sebagian dari masalah pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kinerja perekonomian suatu negara dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi dapat menjadi indikator keberhasilan suatu negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari lima pulau utama, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Walaupun Indonesia memiliki sebuah program pembangunan nasional yang sama namun, tetap saja daerah-daerah tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam proses pembangunan ekonomi di wilayahnya. Permasalahan pembangunan ekonomi juga tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi. Pulau Sumatera merupakan pulau terbesar ketiga di Indonesia yang memiliki sepuluh provinsi dengan karakteristik yang berbeda satu sama lain, mulai dari kandungan sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal dan lainnya.

Keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu negara bisa dilihat dari adanya pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Dalam analisis makro, Indonesia sedang berusaha mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera melalui pembangunan jangka panjang. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pembangunan di berbagai sektor, terutama di sektor perekonomian. Meskipun pertumbuhan ekonomi yang tinggi menunjukkan kinerja ekonomi (*economic performance*) yang baik, namun belum tentu berdampak pada kesetaraan kesejahteraan masyarakat secara merata. Untuk melihat perkembangan perekonomian Indonesia

Tabel 1. 2 Laju Perekonomian Indonesia Tahun 2018 - 2022

No.	Provinsi	Laju Pertumbuhan Ekonomi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Provinsi Aceh	4.61	4.14	-0.4	2.79	4.21
2	Provinsi Sumatera Utara	5.18	5.22	-1.1	2.61	4.73
3	Provinsi Sumatera Barat	5.14	5.01	-1.6	3.29	4.36
4	Provinsi Riau	2.35	2.81	-1.1	3.36	4.55
5	Provinsi Jambi	4.69	4.35	-0.5	3.69	5.13
6	Provinsi Sumatera Selatan	6.01	5.69	-0.1	3.58	5.23
7	Provinsi Bengkulu	4.97	4.94	-0	3.27	4.31
8	Provinsi Lampung	5.23	5.26	-1.7	2.77	4.28
9	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	4.45	3.32	-2.3	5.05	4.4
10	Provinsi Kepulauan Riau	4.47	4.83	-3.8	3.43	5.09
11	Provinsi DKI Jakarta	6.11	5.82	-2.4	3.56	5.25
12	Provinsi Jawa Barat	5.65	5.02	-2.5	3.74	5.45
13	Provinsi Jawa Tengah	5.3	5.36	-2.7	3.33	5.31
14	Provinsi DI Yogyakarta	6.2	6.59	-2.7	5.58	5.15
15	Provinsi Jawa Timur	5.47	5.53	-2.3	3.56	5.34
16	Provinsi Banten	5.77	5.26	-3.4	4.49	5.03
17	Provinsi Bali	6.31	5.6	-9.3	-2.46	4.84
18	Provinsi Nusa Tenggara Barat	-4.5	3.9	-0.6	2.3	6.95
19	Provinsi Nusa Tenggara Timur	5.11	5.25	-0.8	2.52	3.05
20	Provinsi Kalimantan Barat	5.07	5.09	-1.8	4.8	5.07
21	Provinsi Kalimantan Tengah	5.61	6.12	-1.4	3.59	6.45
22	Provinsi Kalimantan Selatan	5.08	4.09	-1.8	3.48	5.11
23	Provinsi Kalimantan Timur	2.64	4.7	-2.9	2.55	4.48
24	Provinsi Kalimantan Utara	5.36	6.89	-1.1	3.98	5.34
25	Provinsi Sulawesi Utara	6	5.65	-1	4.16	5.42
26	Provinsi Sulawesi Tengah	20.6	8.83	4.86	11.7	15.2
27	Provinsi Sulawesi Selatan	7.04	6.91	-0.7	4.64	5.09
28	Provinsi Sulawesi Tenggara	6.4	6.5	-0.7	4.1	5.53
29	Provinsi Gorontalo	6.49	6.4	-0	2.41	4.04
30	Provinsi Sulawesi Barat	6.26	5.56	-2.3	2.57	2.3
31	Provinsi Maluku	5.91	5.41	-0.9	3.05	5.11
32	Provinsi Maluku Utara	7.86	6.25	5.39	16.8	22.9
33	Provinsi Papua Barat	6.25	2.66	-0.8	-0.51	2.01
34	Provinsi Papua	7.32	-15.7	2.39	15.2	8.97
35	Indonesia	5.17	5.02	-2.1	3.7	5.31

Sumber : bapennas.go.id

Berdasarkan data pada tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi di antar Provinsi dari tahun ke tahun semakin meningkat ,Pertumbuhan Ekonomi tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 5.23% pada tahun 2022selanjutnya Provinsi Jambi sebesar 5.13% pada tahun 2022 sedangkan Pertumbuhan ekonomi terendah di Provinsi Aceh sebesar 4,21 % pada tahun 2022 dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia sepanjang 2022 mencapai 5,31%. Secara kumulatif, kinerja perekonomian tahun 2022 menguat dibandingkan dengan tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi pada tahunan Indonesia pada tahun 2022 kembali menyentuh 5% yang sebelumnya akibat pandemic covid-19 pertumbuhan ekonomi Indonesia menyentuh -2,07 pada tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia mulai kembali pulih pasca *recovery* ekonomi.

Tujuan daripada Pembangunan antara lain adalah untuk pemerataan hasil-hasil pembangunan, akan tetapi dalam kenyataannya masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan hasil pembangunan belum dinikmati oleh penduduk secara merata. Adanya ketimpangan pembangunan antar propinsi di Sumatera disebabkan berbagai kendala, baik dari segi investasi, maupun potensi sumber daya alam yang dimiliki masing-masing propinsi yang tidak sama(Yeniwati, 2013).

Jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi suatu daerah merupakan permasalahan mendasar, karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan rakyat serta menekan angka kemiskinan. Jumlah penduduk yang besar dari tahun ketahun akan membuat tingkat kemiskinan semakin meningkat.

Tabel 1. 3 Jumlah Penduduk Provinsi Indonesia 2018-2022

Provinsi di Indonesia	Jumlah Penduduk Menurut Provinsi di Indonesia (Ribu Jiwa)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Aceh	5243.4	5316.3	5274.9	5333.7	5407.9
Sumatera Utara	14476.0	14639.4	14799.4	14936.2	15115.2
Sumatera Barat	5411.8	5479.5	5534.5	5580.2	5640.6
Riau	6717.6	6835.1	6394.1	6493.6	6614.4
Kep. Riau	2174.8	2241.6	2064.6	2118.2	2179.8
Jambi	3527.1	3566.2	3548.2	3585.1	3631.1
Sumatera Selatan	8391.5	8497.2	8467.4	8550.9	8657.0
Kep. Bangka Belitung	1432.1	1451.1	1455.7	1473.2	1494.6
Bengkulu	1948.6	1971.8	2010.7	2032.9	2060.1
Lampung	8377.7	8457.6	9007.8	9081.8	9176.6
DKI Jakarta	10428.0	10504.1	10562.1	10609.7	10680.0
Jawa Barat	48475.5	49023.2	48274.2	48782.4	49405.8
Banten	12530.8	12714.3	11904.6	12061.5	12252.0
Jawa Tengah	34358.5	34552.5	36516.0	36742.5	37032.4
DI Yogyakarta	3818.3	3868.6	3668.7	3712.9	3761.9
Jawa Timur	39521.9	39744.8	40665.7	40878.8	41150.0
Kalimantan Barat	4985.1	5045.7	5414.4	5470.8	5541.4
Kalimantan Tengah	2612.6	2649.8	2670.0	2702.2	2741.1
Kalimantan Selatan	4162.4	4216.3	4073.6	4122.6	4182.1
Kalimantan Timur	3573.8	3619.7	3766.0	3808.2	3859.8
Kalimantan Utara	682.8	695.6	701.8	713.6	727.8
Sulawesi Utara	2474.4	2494.1	2621.9	2638.6	2659.5
Gorontalo	1166.1	1176.4	1171.7	1181.0	1192.7
Sulawesi Tengah	3001.9	3042.1	2985.7	3021.9	3066.1
Sulawesi Selatan	8748.1	8819.5	9073.5	9139.5	9225.8
Sulawesi Barat	1340.1	1359.2	1419.2	1436.8	1458.6
Sulawesi Tenggara	2623.6	2663.7	2624.9	2659.2	2701.7
Bali	4309.2	4362.0	4317.4	4362.7	4415.1
Nusa Tenggara Barat	5077.7	5152.4	5320.1	5390.0	5473.7
Nusa Tenggara Timur	5360.3	5437.2	5325.6	5387.7	5466.3
Mahuku	1749.5	1768.5	1848.9	1862.6	1881.7
Mahuku Utara	1218.8	1235.7	1282.9	1299.2	1319.3
Papua Barat	941.4	963.6	1134.1	1156.8	1183.3
Papua	3300.2	3347.1	4303.7	4355.5	4418.6
Indonesia	264161.6	266911.9	270203.9	272682.5	275773.8

Sumber : bps.go.id

Berdasarkan data pada tabel 1.4 diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Provinsi dari tahun ke tahun semakin meningkat. Jumlah penduduk pada provinsi pulau sumatera dari tahun 2018 terus mengalami peningkatan khususnya di sumatera utara sudah mencapai 14476.0 jiwa hingga saat ini di periode tahun 2022 penduduk sumatera utara sudah mencapai 15115,2 jiwa . bahkan jumlah penduduk indonesia sudah mencapai 275,773,8 jiwa indonesia merupakan penduduk terbanyak ke-4 setelah china dan india , Jumlah penduduk yang besar dari tahun ketahun akan membuat tingkat kemiskinan semakin meningkat. Selain itu pertumbuhan penduduk yang sangat pesat akan menimbulkan masalah-masalah baru baik dari segi sosial maupun ekonomi.

Salah satu unsur yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila kondisi

tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (full employment) dapat terwujud. Sumber-sumber alam yang tersedia merupakan batas maksimum bagi pertumbuhan perekonomian. Akan tetapi, ada beberapa para ahli kurang menekankan aspek penduduk, dengan menganggap bahwa penduduk memiliki peran pasif yang hanya berfungsi sebagai penyediaan tenaga kerja dalam proses produksi. Perkembangan selanjutnya tentang analisis posisi penduduk dalam pembangunan ekonomi sejalan dengan lahirnya teori pertumbuhan ekonomi

Tabel 1. 4 Jumlah Pengangguran Terbuka

Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022
ACEH	6.34	6.17	6.59	6.3	6.17
SUMATERA UTARA	5.55	5.39	6.91	6.33	6.16
SUMATERA BARAT	5.66	5.38	6.88	6.52	6.28
RIAU	5.98	5.76	6.32	4.42	4.37
JAMBI	3.73	4.06	5.13	5.09	4.59
SUMATERA SELATAN	4.27	4.53	5.51	4.98	4.63
BENGGULU	3.35	3.26	4.07	3.65	3.59
LAMPUNG	4.04	4.03	4.67	4.69	4.52
KEP. BANGKA BELITUNG	3.61	3.58	5.25	5.03	4.77
KEP. RIAU	8.04	7.5	10.34	9.91	8.23
DKIJAKARTA	6.65	6.54	10.95	8.5	7.18
JAWA BARAT	8.23	8.04	10.46	9.82	8.31
JAWA TENGAH	4.47	4.44	6.48	5.95	5.57
DI YOGYAKARTA	3.37	3.18	4.57	4.56	4.06
JAWA TIMUR	3.91	3.82	5.84	5.74	5.49
BANTEN	8.47	8.11	10.64	8.98	8.09
BALI	1.4	1.57	5.63	5.37	4.8
NUSA TENGGARA BARAT	3.58	3.28	4.22	3.01	2.89
NUSA TENGGARA TIMUR	2.85	3.14	4.28	3.77	3.54
KALIMANTAN BARAT	4.18	4.35	5.81	5.82	5.11
KALIMANTAN TENGAH	3.91	4.04	4.58	4.53	4.26
KALIMANTAN SELATAN	4.35	4.18	4.74	4.95	4.74
KALIMANTAN TIMUR	6.41	5.94	6.87	6.83	5.71
KALIMANTAN UTARA	5.11	4.49	4.97	4.58	4.33
SULAWESI UTARA	6.61	6.01	7.37	7.06	6.61
SULAWESI TENGAH	3.37	3.11	3.77	3.75	3
SULAWESI SELATAN	4.94	4.62	6.31	5.72	4.51
SULAWESI TENGGARA	3.19	3.52	4.58	3.92	3.36
GORONTALO	3.7	3.76	4.28	3.01	2.58
SULAWESI BARAT	3.01	2.98	3.32	3.13	2.34
MALUKU	6.95	6.69	7.57	6.93	6.88
MALUKU UTARA	4.63	4.81	5.15	4.71	3.98
PAPUA BARAT	6.45	6.43	6.8	5.84	5.37
PAPUA	3	3.51	4.28	3.33	2.83
INDONESIA	5.3	5.23	7.07	6.49	5.86

Sumber : bps.go.id

Berdasarkan data pada tabel 1.4 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera dari tahun 2018 sampai 2022 mengalami fluktuatif. Kep.riau pada 2022 mencapai pengangguran terbuka tertinggi mencapai 8,23% di susul Sumatera Barat mencapai angka 6,28% menandakan pengangguran dengan

persentase masih jauh dengan target RKP terjadi pada tahun 2022 sedangkan juga pada tahun 2018 kepulauan riau mencapai 8,04% dan aceh mencapai 6.34% ini merupakan tingkat pengangguran terbuka belum memenuhi target RKP di beberapa provinsi sumatera terjadi pada tahun 2018 ,di data indonesia tingkat pengangguran terbuka sendiri sudah mulai adanya penurunan walaupun pada tahun 2020 mencapai 7.07% karena indonesia terdampak covid-19 dan periode 2021-2022 tingkat pengangguran indonesia mengalami penurunan 2% . Indikator yang digunakan untuk mengukur pengangguran dalam penelitian ini ialah tingkat pengangguran. Dimana tingkat pengangguran memberikan indikasi besarnya penduduk usia kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Berdasarkan pada penelitian Hanung Baktianto Saputro bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan membentuk U Terbalik, yang artinya membuktikan bahwa Hipotesis Kuznets berlaku. Berdasarkan pada penelitian terdahulu menurut (Mardiana, 2019) dan (Saputro & Kuncoro, 2014) bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan tidak membentuk U Terbalik, yang artinya membuktikan bahwa Hipotesis Kuznets tidak berlaku. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan sekarang adalah pada penelitian (Mardiana, 2019) terdapat perbedaan yaitu penelitian terdahulu menggunakan alat analisis Indeks Williamson, Korelasi Pearson dan Analisis Hipotesis Kuznets, sedangkan pada penelitian ini menggunakan alat analisis Indeks Wiliamson, Indeks Entropi Theil, Korelasi Pearson dan Hipotesis kurznet.

Terdapat perbedaan yaitu penelitian terdahulu menggunakan alat analisis Indeks Williamson, Tipology Klassen dan Analisis HipotesisiKuznets, sedangkan

pada penelitian ini menggunakan alat analisis Indeks Williamson, Indeks Entropi Theil, Korelasi Pearson dan Analisis Hipotesis Kuznets. Pada penelitian (Saputro & Kuncoro, 2014) terdapat perbedaan yaitu penelitian yang menggunakan alat analisis Indeks Williamson, Indeks Entropi Theil, Konvergensi Sigma dan Analisis Hipotesis Kuznets, sedangkan pada penelitian ini menggunakan alat analisis Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pembuktian berlaku atau tidak Hipotesis Kuznets di Provinsi Sumatera pada Tahun 2018-2022. Selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat pada bidang akademis untuk mampu memberi tambahan referensi dalam dunia ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan ekonomi pembangunan khususnya pada pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang diatas, maka didapat beberapa permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Beberapa provinsi di pulau Sumatera mempunyai tingkat pengangguran yang lebih tinggi dari tingkat pengangguran nasional.
2. Jumlah pertumbuhan penduduk di beberapa provinsi pulau Sumatera mempunyai tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dari pertumbuhan nasional.
3. Pertumbuhan ekonomi di antar pulau Sumatera di beberapa Provinsi tidak naik secara merata dari 5 tahun terakhir .

1.3. Batasan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah di uraikan, maka penulis membatasi masalah yang akan di teliti mengenai analisis

faktor yang mempengaruhi ketimpangan di pulau sumatera sehingga penulis memfokuskan pada Pertumbuhan Ekonomi ,Jumlah Penduduk dan dan Pengangguran di pulau sumatera pada tahun 2013-2022, Alasan penelitian ini dibatasi agar lebih terarah dan tidak menyimpang dari yang di persoalkan dan juga dapat mencapai sasaran yang di harapkan.

1.4. Rumusan masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah ketimpangan pendapatan antar provinsi di Pulau Sumatera?
2. Apa faktor yang meyebabkan ketimpangan pendapatan antar propinsi di Pulau Sumatera?

1.5. Tujuan Penelitan

Bedasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah di atas , maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Melakukan analisis deskriptif tentang ketimpanagan pendapatan antar ptopinsi di Pulau Sumatera.
2. Mengestimasi faktor yang mempengaruhi pendapatan antar ptopinsi di Pulau Sumateraa

1.6. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bagi pemerintah Provinsi Sumatera Utara, hasil dari penelitian ini dapat

digunakan sebagai salah satu referensi atau informasi untuk dijadikan acuan dalam menetapkan kebijakan yang tepat guna mengurangi tingkat kemiskinan.

3. Bagi masyarakat umum, diharapkan dapat menambah wawasan dan berguna sebagai salah satu informasi mengenai masalah kemiskinan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses multifimensional yang mencakup adanya berbagai perubahan seperti pada struktur ekonomi dan sosial, sikap-sikap masyarakat, dan perubahan dalam kelembagaan nasional, di samping tetap dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan (Frisdiantara & Mukhlis, 2018).

Menurut Rapanna & Sukarno (2017) pembangunan ekonomi adalah sebuah proses kenaikan pendapatan secara total dan maksimal, pendapatan perkapita penduduk dengan memperhitungkan penambahan penduduk serta terdapat perubahan yang fundamental pada struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk dalam jangka waktu yang panjang.

2.1.2 Teori Pembangunan Ekonomi

Terdapat beberapa teori mengenai pembangunan yang dicetus oleh para ahli ekonomi. berikut beberapa contoh teori pembangunan ekonomi, yaitu:

- a. Teori Akumulasi Modal Harrod-Domar Purnamasari (2019) menjelaskan Teori yang dicetus oleh R.F. Harrod dan Evsey Domar tentang tabungan dan investasi. Teori ini menyatakan bahwa dalam proses pembangunan perlu adanya ketersediaan modal dan investasi

atau penanaman modal. Modal dan investasi sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan sebagai salah satu pendorong dalam kegiatan produksi. Dengan tingkat produktivitas yang tinggi akan dapat meningkatkan lapangan kerja di masyarakat, hal tersebut akan berdampak pada pembangunan ekonomi yang dapat dilihat dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat. berikut merupakan badan dari teori Harrod Domar.

- b. Teori Pembangunan Arthur Lewis Prawoto (2019) Teori Arthur Lewis membahas proses pembangunan yang terjadi antara daerah kota dan desa, yang mengikutsertakan proses urbanisasi serta pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja yang berasal dari desa harus dapat menyediakan upah subsisten dan upah “biaya pindah” agar tenaga kerja mau meninggalkan kampung halamannya. Teori ini juga membahas permasalahan pada negara berkembang, dimana terdapat dua sektor yang menjadi pokok permasalahannya, yaitu sektor 20 tradisional yang memiliki tingkat produktivitas yang rendah namun memerlukan tenaga kerja yang banyak, dan sektor modern yang memiliki tingkat produktivitas yang cukup tinggi dan dapat dijadikan sumber kapital

2.1.3 Ketimpangan Ekonomi

Menurut Damanhuri & Findi (2014) distribusi pendapatan merupakan suatu hal yang menjelaskan tentang penyebaran pendapatan antara kelompok kaya dengan kelompok miskin. Dari kondisi tersebut dapat terlihat bahwa terjadi ketidakmerataan distribusi pendapatan, yang

mana sering terjadi akibat adanya perbedaan sumber daya alam dan kondisi demografi. Perbedaan tersebutlah yang menyebabkan proses pembangunan setiap daerah menjadi beda-beda. Dengan begitu tidak heran jika suatu daerah memiliki daerah yang maju dan juga daerah yang tertinggal.

Badriah (2019) mengemukakan bahwa terdapat beberapa penyebab ketimpangan pendapatan, yaitu:

1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi
2. Terjadinya inflasi
3. Ketimpangan pembangunan antar wilayah
4. Investasi besar-besaran pada proyek padat modal
5. Adanya kebijakan substitusi impor
6. Memburuknya nilai tukar bagi negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara maju
7. Adanya pergeseran intersektoral dalam struktur produksi dari sektor pertanian ke industri dan pergeseran penduduk ke daerah perkotaan
8. Ketimpangan pasar tenaga kerja
9. Ketimpangan pendidikan.

Pangestuty & Prasetyia (2021) menyatakan bahwa terdapat dampak yang ditimbulkan ketika terjadi ketidakmerataan pendapatan diantaranya ketidakadilan sosial, menciptakan berbagai masalah sosial politik (ketidakpuasan dan frustrasi di kalangan masyarakat miskin) yang mana hal tersebut berujung pada gangguan dan perang saudara serta

menghancurkan basis sosial politik kegiatan ekonomi ketimpangan distribusi pendapatan di suatu negara, diantaranya yaitu kriteria World Bank dan Indeks Gini.

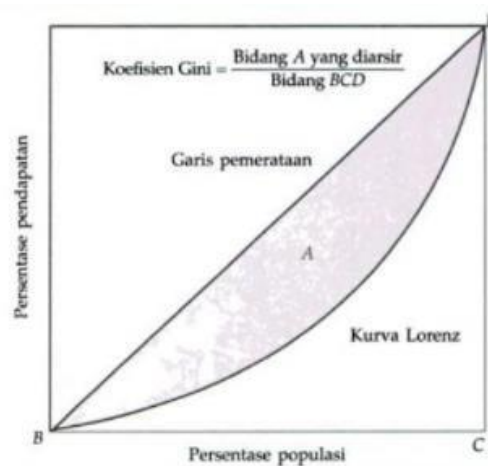
1. Distribusi pendapatan berdasarkan World Bank

World bank (bank dunia) menetapkan kriteria berupa pembagian pendapatan berdasarkan pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk yang berpendapatan rendah. Bank dunia membagi 3 (tiga) kategori penduduk, yaitu masing-masing sebesar 40% untuk penduduk yang berpendapatan rendah dan menengah serta sisanya sebesar 20% untuk penduduk yang berpendapatan tinggi. Selanjutnya ketidakmerataan pembagian pendapatan dikategorikan menjadi 3 (tiga), yaitu: 1. Tinggi, jika 40% masyarakat dengan penghasilan terendah menerima < (lebih kecil dari) 12% bagian pendapatan 2. Sedang, jika 40% masyarakat dengan penghasilan terendah menerima 12 hingga 17% bagian pendapatan 3. Rendah, jika 40% masyarakat dengan penghasilan terendah menerima > (lebih besar dari) 17% bagian pendapatan.

2. Rasio Gini

Indikator ini menjadi salah satu cara yang paling umum digunakan untuk mengukur ketimpangan. Nilai rasio gini berada diantara 0 sampai dengan 1. Nilai 0 menunjukkan bahwa seluruh pendapatan terbagi secara merata atau dapat dikatakan bahwa ketimpangan sempurna, sedangkan nilai 1 berarti seluruh pendapatan hanya dimiliki oleh satu orang atau dapat dikatakan bahwa

ketimpangan tidak sempurna. Ketimpangan dikatakan rendah apabila nilai rasio gini sebesar 0,4 atau di bawahnya dan dikatakan tinggi bila memiliki nilai diatas 0,4. Rasio gini sering sekali ditampilkan berdampingan dengan Kurva Lorenz.. Kurva tersebut menggambarkan kaitan antara sebaran kumulatif tingkat pendapatan dengan jumlah penduduk. Perhitungan koefisien gini pada dasarnya berasal dari upaya pengukuran luas kurva Lorenz.



Gambar 2.2. Kurva Lorenz

Dari gambar diatas, besarnya ketimpangan distribusi pendapatan ditunjukkan pada daerah yang diarsir (A). Besarnya indeks gini adalah perbandingan (rasio) antara luas area yang diarsir (A) dibagi dengan luas area segitiga bidang BCD. Makna gambar tersebut yaitu semakin kurva lorenz menjauh dari garis diagonal maka menandakan semakin tidak merata distribusi pendapatannya untuk mengukur dan menilai tingkat ketimpangan pendapatan atau indikator untuk mengetahui seberapa besar ketimpangan pendapatan.

2.2 Pengertian Pendapatan

Dalam mengukur kondisi ekonomi seseorang atau rumah tangga, salah satu

konsep pokok yang paling sering digunakan yaitu melalui tingkat pendapatan. Pendapatan menunjukkan seluruh uang atau hasil material lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan atau jasa yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi (Winardi,2016;32). Dengan kata lain pendapatan dapat juga diuraikan sebagai keseluruhan penerimaan yang diterima pekerja, buruh atau rumah tangga, baik berupa fisik maupun non fisik selama ia melakukan pekerjaan pada suatu perusahaan instansi atau pendapatan selama ia bekerja atau berusaha. Setiap orang yang bekerja akan berusaha untuk memperoleh pendapatan dengan jumlah yang maksimum agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.

Maksud utama para pekerja yang bersedia melakukan berbagai pekerjaan adalah untuk mendapatkan pendapatan yang cukup baginya, sehingga kebutuhan hidupnya ataupun rumah tangganya akan tercapai. Penduduk perkotaan umumnya dan golongan keluarga berpenghasilan rendah khususnya mempunyai berbagai sumber pendapatan. Pendapatan yang dimaksud dalam hal ini adalah pendapatan uang yang diterima dan diberikan kepada 16 subjek ekonomi berdasarkan prestasi- prestasi yang diserahkan, yaitu berupa pendapatan dari pekerjaan, pendapatan dari profesi yang diterima sendiri, usaha perseorangan dan pendapatan dari kekayaan, serta dari sektor subsisten, yaitu untuk bertahan hidup secara wajar dan didapatkannya suatu jaminan kebuthan primer. Pendapatan subsisten adalah pendapatan yang diterima dari usahausaha tambahan yang tidak dipasarkan untuk memenuhi keperluan hidupnya sekeluarga (Mubyarto,2016;33). Pendapatan masyarakat dapat berasal dari bermacam-macam sumbernya, yaitu: ada yang disektor

formal (gaji atau upah yang diterima secara bertahap), sektor informal (sebagai penghasilan tambahan dagang, tukang, buruh, dan lain-lain) dan di sektor subsisten (hasil usaha sendiri berupa tanaman, ternak, dan pemberian orang lain).

Pendapatan merupakan uang yang diterima oleh seseorang atau perusahaan dalam bentuk gaji (salaries), upah (wages), sewa (rent), bunga (interest), laba (profit), dan sebagainya, bersama-sama dengan tunjangan pengangguran, uang pensiun, dan lain sebagainya. Dalam analisis mikro ekonomi, istilah pendapatan khususnya dipakai berkenaan dengan aliran penghasilan dalam suatu periode waktu yang berasal dari penyediaan faktor-faktor produksi (sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal) masing-masing dalam bentuk sewa, upah dan bunga, maupun laba, secara berurutan (Ardiansyah, 2016;34). Menurut Ardiansyah (2016;34) pendapatan dibagi menjadi dua, yaitu pendapatan kotor dan pendapatan bersih. Pendapatan kotor adalah hasil penjualan barang dagangan atau jumlah omset penjualan. Pendapatan bersih adalah penerimaan hasil penjualan dikurangi pembelian bahan, biaya transportasi, retribusi, dan biaya makan atau pendapatan total dimana total dari penerimaan revenue) dikurangi total biaya (cost).

Besarnya pendapatan kotor ini akan berpengaruh langsung dengan pendapatan bersih per hari. Secara garis besar pendapatan digolongkan menjadi tiga golongan Boediono (2014), yaitu:

1. Gaji dan Upah. Imbalan yang diperoleh setelah orang tersebut melakukan pekerjaan untuk orang lain yang diberikan dalam waktu satu hari, satu minggu maupun satu bulan.

2. Pendapatan dari Usaha Sendiri. Merupakan nilai total dari hasil produksi yang dikurangi dengan biaya-biaya yang dibayar dan usaha ini merupakan usaha milik sendiri atau keluarga dan tenaga kerja berasal dari anggota keluarga sendiri, nilai sewa kapital milik sendiri dan semua biaya ini biasanya tidak diperhitungkan.
3. Pendapatan dari Usaha Lain. Pendapatan yang diperoleh tanpa mencurahkan tenaga kerja, dan ini biasanya merupakan pendapatan sampingan antara lain, pendapatan dari hasil menyewakan asset yang dimiliki seperti rumah, ternak dan barang lain, bunga dari uang, sumbangan dari pihak lain, pendapatan dari pensiun, dan lain-lain.

2.2.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan

Tingkat pendapatan dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain: jumlah tenaga kerja, jam kerja, modal usaha, dan pengalaman usaha. Hal-hal yang mempengaruhi pendapatan menurut Oktariana (2007) ditentukan bahwa dengan modal yang relatif besar akan memungkinkan suatu unit penjualan menambah variasi komoditas dagangannya.

Dengan cara ini berarti akan semakin memungkinkan diraihinya pendapatan yang lebih besar. Menurut Oktarina (2007) bahwa penggunaan tenaga kerja dapat pula meningkatkan pendapatan karena dengan tambahan jumlah tenaga kerja akan memungkinkan adanya pelayanan yang lebih baik kepada konsumen, baik dalam arti kualitas maupun kuantitas pelayanan. Melalui cara ini maka akan dapat memikat jumlah pelanggan yang lebih banyak dan lebih memungkinkan terpeliharanya loyalitas pelanggan, dan akhirnya akan meningkatkan pendapatan.

Menurut Oktarina (2007) Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan adalah: 27

- a. Faktor tenaga kerja, dalam hal ini tenaga kerja yang diukur dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan.
- b. Faktor alam, seperti tersedianya bahan baku untuk proses produksi.
- c. Faktor modal, modal yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha, terutama modal kerja untuk kegiatan operasi sehari-hari.
- d. Faktor keahlian, keahlian dalam hal ini ditunjukkan dengan keterampilan kewirausahaan seorang pengusaha, semakin lama seorang pengusaha menekuni usahanya, maka akan semakin memiliki ketrampilan kewirausahaan yang tinggi. Pendapatan merupakan semua penerimaan seseorang sebagai balas jasanya dalam proses produksi.

Balas jasa tersebut bisa berupa upah, bunga, sewa, maupun, laba tergantung pada faktor produksi pada yang dilibatkan dalam proses produksi (Sudremi, 2007:133). Dengan kata lain, pendapatan adalah sejumlah dana yang diperoleh dari pemanfaatan faktor produksi yang dimiliki. Oleh karena itu, menurut Sudremi (2007:133) sumber pendapatan tersebut meliputi :

- 1) Sewa kekayaan yang digunakan oleh orang lain, misalnya menyewakan rumah, tanah.
- 2) Upah atau gaji karena bekerja kepada orang lain ataupun menjadi pegawai negeri. 28
- 3) Bunga karena menanamkan modal di bank ataupun perusahaan, misalnya mendepositokan uang di bank dan membeli saham.

- 4) Hasil dari usaha wiraswasta, misalnya berdagang, bertenak, mendirikan perusahaan, ataupun bertani.

Pendapatan atau income merupakan uang yang diterima oleh seseorang dari perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa, bunga dan laba termasuk juga beragam tunjangan, seperti kesehatan dan pensiun (Adji,2004:3). Masyarakat yang mempunyai penghasilan yang kecil, hasil dari pekerjaannya hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk keluarga yang berpenghasilan menengah mereka lebih terarah kepada pemenuhan kebutuhan pokok yang layak seperti makan, pakaian, perumahan, pendidikan dan lain-lain.

Sedangkan keluarga yang berpenghasilan tinggi dan berkecukupan mereka akan memenuhi segala keinginan yang mereka inginkan termasuk keinginan untuk menyekolahkan anak mereka ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Masyarakat membutuhkan biaya yang tidak kecil untuk menyekolahkan anaknya, sehingga membutuhkan suatu pengorbanan pendidikan. Pengorbanan pendidikan itu dianggap sebagai suatu investasi di masa depan. Pembiayaan yang dialokasikan untuk pendidikan tidak semata-mata bersifat konsumtif, tetapi lebih merupakan suatu investasi dalam rangka meningkatkan kapasitas tenaga kerja untuk menghasilkan barang dan jasa. Pendidikan di sekolah merupakan 29 salah satu bagian investasi dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia.

Pendapatan masyarakat adalah penerimaan sari gaji atau balas dari hasil yang diperoleh individu atau kelompok rumah tangga dalam satu bulan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

(Soekartawi,2002:132). menjelaskan pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsi, bahwa sering kali dijumpai dengan bertambahnya pendapatan, maka barang yang dikonsumsi bukan saja bertambah, tapi juga kualitas barang tersebut ikut menjadi perhatian. Misalnya sebelum adanya penambahan pendapatan beras yang dikonsumsi adalah kualitas yang kurang baik, akan tetapi setelah adanya penambahan pendapatan maka konsumsi beras menjadi kualitas yang lebih baik. Tinggi rendahnya pengeluaran sangat tergantung kepada kemampuan keluarga dalam mengelola penerimaan atau pendapatannya.

Selain itu pengalaman berusaha juga mempengaruhi pendapatan. Semakin baiknya pengalaman usaha seseorang maka semakin berpeluang dalam meningkatkan pendapatan. Karena seseorang atau kelompok memiliki kelebihan keterampilan dalam meningkatkan aktifitas sehingga pendapatan turut meningkat. Usaha meningkatkan pendapatan masyarakat dapat dilakukan dengan pemberantasan kemiskinan yaitu membina masyarakat, kelompok masyarakat dapat dikembangkan dengan pemodal modal kerja.

2.2.2 Pengertian Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan adalah penyaluran atau pembelanjaan masyarakat untuk kebutuhan konsumsi. Kurangnya distribusi pendapatan dapat menimbulkan daya beli rendah, terjadinya tingkat kemiskinan, ketidakadilan, kelaparan dan lain-lain yang akhirnya akan menimbulkan anti pati golongan masyarakat yang berpendapatan rendah terhadap yang berpendapatan tinggi, sehingga akan menimbulkan kecemburuan sosial di

dalam masyarakat.

Kata distribusi mengandung arti pembagian atau pemerataan, dan pendapatan dapat diartikan sebagai suatu yang diperoleh atau yang dihasilkan dari suatu kegiatan usaha. Jadi distribusi pendapatan secara umum dapat diartikan sebagai pembagian atau pemerataan hasil yang diperoleh dari suatu kegiatan usaha, distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat, karena pada dasarnya ini merupakan ukuran kemiskinan relatif. Karena kemiskinan didefinisikan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi belum dapat membawa yang tinggi akan cenderung menimbulkan ketimpangan dalam pendapatan sehingga mengakibatkan adanya kemiskinan. Karena itu pemerintah berusaha untuk mengurangi kemiskinan dan pemerataan pendapatan melalui delapan jalur pemerataan yaitu :

1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan dasar sangat banyak khususnya pangan, sandang dan perumahan.
2. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan pelayanan kesehatan.
3. Pemerataan pembagian pendapatan.
4. Pemerataan kesempatan kerja.
5. Pemerataan kesempatan berusaha.
6. Pemerataan partisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan wanita.
7. Pemerintah penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air.

2.2.3 Faktor Yang Menyebabkan Ketidakmerataan Distribusi Pendapatan

Menurut Arsyad (2004) mengemukakan delapan faktor yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan di negaranegara sedang berkembang, yaitu:

1. Pertambahan penduduk yang tinggi dapat mengakibatkan penurunan pendapatan perkapita.
2. Inflasi, dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barangbarang.
3. Ketidak merataan pembangunan daerah.
4. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (capital Intensive) sehingga presentase pendapatan modal dari tambahan harta lebih besar dibandingkan dengan presentase pendapatan dari kerja, sehingga pengangguran bertambah.
5. Rendahnya mobilitas sosial
6. Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha golongan kapitalis

Memburuknya nilai tukar (term of trade) bagi negara-negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara maju, sebagai akibat ketidakelastisan permintaan negara-negara terhadap barang ekspor dari negara-negara sedang berkembang Memburuknya industry kerajinan rakyat seperti pertukangan, industry rumah tangga dan lain-lain.

Beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya ketimpangan antar wilayah menurut Sjafrizal (2012) yaitu :

1. Perbedaan Kandungan Sumber Daya Alam Perbedaan kandungan

sumber daya alam akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumber daya alam cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relative murah dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih rendah. Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan lebih cepat.

2. Perbedaan Kondisi Demografis Perbedaan kondisi demografis meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah yang bersangkutan. Kondisi demografis akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat setempat. Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan cenderung mempunyai produktivitas kerja yang lebih tinggi sehingga hal ini akan mendorong peningkatan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.
3. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa Mobilitas barang dan jasa meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi baik yang disponsori oleh pemerintah (transmigrasi) atau migrasi spontan. Alasannya adalah apabila mobilitas kurang lancar maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan. Akibatnya adalah ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi, sehingga daerah terbelakang sulit mendorong proses pembangunannya

4. Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah Pertumbuhan ekonomi wilayah akan cenderung lebih cepat pada suatu daerah dimana konsentrasi kegiatan 36 ekonominya cukup besar. Kondisi inilah yang selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat.
5. Alokasi dana pembangunan antar wilayah Alokasi dana ini bisa berasal dari pemerintah maupun swasta. Pada sistem pemerintahan otonomi maka dana pemerintah akan lebih banyak dialokasikan ke daerah sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung lebih rendah. Untuk investasi swasta lebih banyak ditentukan oleh kekuatan pasar, dimana keuntungan lokasi yang dimiliki oleh suatu daerah merupakan kekuatan yang berperan banyak dalam menarik investasi swasta. Keuntungan lokasi ditentukan oleh biaya transport baik bahan baku dan hasil produksi yang harus dikeluarkan pengusaha, perbedaan upah buruh, konsentrasi pasar, tingkat persaingan usaha dan sewa tanah. Oleh karena itu investasi akan cenderung lebih banyak di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan.

2.3 Ketimpangan Pembangunan

Faktor Penyebab Ketimpangan Pembangunan Ketimpangan pembangunan terjadi tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya menurut Carlos Chrisyanto (2015) Terjadinya perbedaan dari distribusi pendapatan antar daerah dan distribusi pengeluaran pemerintah pusat dan daerah merupakan satu permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan di

berbagai daerah di Indonesia. Perbedaan tersebut terjadi selama bertahun-tahun lamanya sehingga menyebabkan terjadinya ketimpangan antar daerah satu dengan yang lain. Dilakukannya satu kebijakan pemerintah yaitu otonomi daerah masih belum mampu memperkecil adanya ketimpangan tersebut, dimana terlihat adanya perbedaan tingkat pembangunan antara lain perbedaan tingkat pendapatan per kapita dan infrastruktur di daerah yang disebabkan karena minimnya pengeluaran pembangunan di daerah. Mengacu pada perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan ekonomi daerah melalui Indeks Williamson, faktor-faktor yang dianalisa tersebut adalah PDRB, Pendapatan Per Kapita dan Pengeluaran daerah untuk Pembangunan selama masa sebelum dan sesudah krisis.

2.3.1 Pengukuran Ketimpangan Pembangunan

1. Indeks Wiliamsen

Menurut Williamson yang meneliti hubungan antara ketimpangan regional dan tingkat pembangunan ekonomi dengan menggunakan data ekonomi negara yang sudah maju dan yang sedang berkembang. Ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, ketimpangan regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu. Pada tahap yang lebih “matang”, dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tampak adanya keseimbangan antar daerah dan ketimpangan berkurang dengan signifikan (Kuncoro: 134). Dalam perhitungannya, Indeks Williamson menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita dan jumlah penduduk sebagai data dasar. Adapun Indeks Williamson secara

statistik dapat diformulasikan sebagai berikut :

$\sqrt{\sum}$ Keterangan : IW = Indeks Williamson

Y_i = PDRB per kapita (dalam penelitian ini adalah kabupaten)

Y = PDRB per kapita (provinsi)

F_i = Jumlah penduduk (dalam penelitian ini adalah kabupaten)

n = Jumlah penduduk (provinsi)

Nilai Indeks Williamson berkisar antara 0 – 1 (positif). Semakin besar nilai indeksnya, maka semakin besar juga tingkat ketimpangan pendapatan antar wilayah. Sebaliknya, semakin kecil nilai indeksnya, maka semakin kecil pula tingkat ketimpangan yang terjadi di wilayah tersebut. Ketidakmerataan tinggi terjadi pada nilai indeks diatas 0,50. Sedangkan ketidakmerataan dikatakan rendah apabila nilai indeksnya dibawah 0,50.

2. Indeks Entropi Theil

Konsep ini pada dasarnya merupakan aplikasi konsep teori informasi dalam mengukur kesenjangan ekonomi dan konsentrasi industri. Pengukuran menggunakan indeks ini memiliki kelebihan dimana pengukuran ini memungkinkan peneliti untuk membuat perbandingan selama waktu tertentu secara rinci dalam subunit geografis yang lebih kecil. Penghitungan indeks ini memiliki kegunaan menganalisis kecenderungan konsentrasi geografis selama periode tertentu dan dapat mengkaji gambaran yang lebih rinci mengenai kesenjangan spasial.

Keunggulan lain yang dimiliki oleh penghitungan menggunakan indeks ini adalah pada suatu titik waktu, indeks ini menyediakan derajat

konsentrasi distribusi spasial pada sejumlah daerah dan sub-daerah dalam suatu negara.

Indeks ini dapat dicari melalui rumus penghitungan sebagai berikut ini

(Kuncoro dan Sutarno) :

$$\sum \left(\frac{y_j}{Y} \right) x \log \left[\frac{\bar{y}}{x_j} \right]$$

di mana :

Y_j = PDRB per kapita kecamatan i (juta Rupiah)

Y = rata-rata PDRB per kapita kabupaten (juta Rupiah)

X_j = jumlah penduduk kecamatan j (jiwa/orang) X = jumlah penduduk kabupaten (jiwa/orang).

2.3.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator keberhasilan pertumbuhan ekonomi adalah laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diimbangi dengan pemerataan pendapatan dan hasil pembangunan. Pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan perekonomian pada tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebenarnya (Sukirno, 2015).

Pertumbuhan ekonomi hanya menangkap pertumbuhan produksi barang dan jasa di tingkat nasional, karena pembangunannya memiliki skala yang lebih besar. Salah satu tujuan pembangunan ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang diukur dari pertumbuhan pendapatan nasional bruto (PDB) daerah yang dihitung dengan harga konstan. Dalam jangka panjang, pertumbuhan PDB menunjukkan adanya proses

peningkatan output per kapita. Penjelasan tentang proses ini karena melibatkan unsur-unsur dinamis dari perubahan atau perkembangan. Oleh karena itu, pengertian pertumbuhan ekonomi, misalnya, dapat dilihat sepanjang tahun.

Aspek-aspek tersebut dimasukkan dalam analisis untuk melihat efektivitas kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah dalam mendorong kegiatan ekonomi domestik (Sukirno, 2015).

2.4 Kependudukan

Berdasarkan penjelasan resmi Badan Pusat Statistik, istilah penduduk dapat didefinisikan sebagai semua orang yang tinggal atau berdomisili di suatu wilayah dan menetap di wilayah tersebut selama enam bulan atau lebih dan atau orang tersebut tinggal kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Istilah penduduk juga dapat diartikan secara lebih luas lagi, yaitu warga yang mendiami suatu daerah geografis tertentu. Penduduk lebih identik sebagai warga yang menetap di suatu daerah tertentu dan telah diakui keberadaannya di daerah tersebut melalui adanya bukti, seperti bukti yang tertera pada kartu identitas.

Istilah penduduk cukup lekat kaitannya dengan beberapa aspek pembahasan dalam keilmuan, layaknya sosiologi, geografi, maupun ekonomi. Melalui sudut pandang ekonomi, penduduk sering kali dikaitkan dengan banyak hal, seperti di antaranya yaitu dalam hal pemasaran dan unit-unit ekonomi lainnya. Selain itu, permasalahan yang berkaitan dengan kependudukan biasa dipelajari juga sebagai bagian dari ilmu demografi. Ilmu demografi itu sendiri dapat mencakup pembahasan terkait jumlah penduduk,

persebaran geografisnya, serta berbagai hal lainnya yang masih berkaitan dengan kependudukan dalam sudut pandang analisis kuantitatif.

Pertumbuhan penduduk merupakan suatu bentuk keseimbangan yang dinamis antara berbagai kekuatan yang mampu menambah jumlah penduduk dengan berbagai kekuatan lainnya yang mampu mengurangi jumlah penduduk yang berlangsung secara terus-menerus. Terdapat tiga variabel utama atau pemicu yang dapat sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya angka pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran (*birth*), kematian (*death*) dan perpindahan penduduk atau migrasi (*migration*).

Pertumbuhan penduduk pada umumnya akan melewati empat tahapan periode, di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Periode I

Tahapan pertama yang akan dilalui oleh pertumbuhan penduduk adalah kondisi pada saat pertumbuhan penduduk berjalan lambat dengan angka kelahiran dan kematian yang rendah, periode ini biasa disebut juga dengan periode statis.

b. Periode II

Tahapan kedua yang akan dilalui oleh pertumbuhan penduduk adalah kondisi pada saat pertumbuhan penduduk berjalan cepat dengan kematian yang menurun dan angka kelahiran cenderung tinggi bersamaan dengan adanya perbaikan gizi dan kesehatan.

c. Periode III

Tahapan ketiga yang akan dilalui oleh pertumbuhan penduduk adalah kondisi pada saat pertumbuhan penduduk kembali menurun dikarenakan

adanya pembatasan jumlah anggota keluarga yang menekan angka kelahiran.

d. Periode IV

Tahapan keempat yang akan dilalui oleh pertumbuhan penduduk adalah kondisi pada saat pertumbuhan penduduk rendah dengan angka kematian stabil dan angka kelahiran menurun, periode ini biasa disebut juga dengan periode penduduk stasioner.

Kepadatan penduduk merupakan ukuran jumlah penduduk yang dibagi berdasarkan luas wilayah geografis tertentu. Semakin banyak jumlah penduduk yang mendiami suatu wilayah dengan luas yang sempit, maka tingkat kepadatan penduduk di wilayah tersebut termasuk ke dalam kategori tingkat kepadatan yang tinggi. Sedangkan, apabila jumlah penduduk yang sedikit mendiami suatu wilayah yang luas, maka tingkat kepadatan penduduk di wilayah tersebut rendah.

Pengendalian jumlah penduduk merupakan suatu rancangan kegiatan yang ditujukan untuk membatasi laju pertumbuhan penduduk. Kebanyakan dari teknik pengendalian jumlah penduduk yang umum di masyarakat adalah dengan cara mengurangi angka kelahiran. Upaya pengendalian jumlah penduduk yang diterapkan oleh Indonesia salah satunya adalah melalui program Keluarga Berencana (KB) yang dapat mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan menekan angka kelahiran baru.

Secara umum, terdapat dua cara yang biasa digunakan oleh pemerintah dalam menerapkan pengendalian jumlah penduduk. Pertama adalah *positive check*, yaitu suatu teknik pengendalian yang tidak moralis dan

tidak dapat dikontrol, contohnya seperti adanya wabah dan terjadinya peperangan. Kedua adalah *preventive check*, yaitu teknik pengendalian jumlah penduduk dengan melakukan pengekangan moral untuk membatasi kelahiran dengan menunda pernikahan atau pembatasan jumlah anggota keluarga.

1. Teori Kependudukan Malthusian (Thomas Robert Malthus)

Malthus adalah orang pertama yang mengemukakan tentang penduduk. Dalam "*Essay on Population*", Malthus beranggapan bahwa bahan makanan penting untuk kelangsungan hidup, nafsu manusia tak dapat ditahan dan pertumbuhan penduduk jauh lebih cepat dari bahan makanan. Teori Malthus menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur sedangkan pertumbuhan ketersediaan pangan mengikuti deret hitung, pada kasus ini dimana terdapat permasalahan meledaknya jumlah penduduk dikota yang tidak diimbangi dengan ketersediaan pangan pun berkurang, hal ini merupakan perimbangan yang kurang menguntungkan jika kita kembali kepada teori Malthus (Edmund Conway, 2015).

Teori Malthus jelas menekankan tentang pentingnya keseimbangan pertambahan jumlah penduduk menurut deret ukur terhadap persediaan bahan makanan menurut deret hitung. Teori Malthus tersebut sebetulnya sudah mempersoalkan daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan. Tanah sebagai suatu komponen lingkungan alam tidak mampu menyediakan hasil pertanian untuk mencukupi kebutuhan jumlah penduduk yang terus bertambah dan makin banyak. Daya dukung tanah sebagai komponen lingkungan menurun, karena beban manusia yang makin

banyak. Jumlah penduduk harus seimbang dengan batas ambang lingkungan, agar tidak menjadi beban lingkungan atau mengganggu daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan menampakkan bencana alam berupa banjir, kekeringan, gagal panen, kelaparan, wabah penyakit dan kematian.

Menurut pendapatnya, faktor pencegah dari ketidakseimbangan penduduk dan manusia antara lain *Preventive checks* (penundaan perkawinan, mengendalikan hawa nafsu dan pantangan kawin), *Possitive checks* (bencana alam, wabah penyakit, kejahatan dan peperangan). Robert Malthus ini mengemukakan beberapa pendapat tentang kependudukan, yaitu :

- a. Penduduk (seperti juga tumbuhan dan binatang) apabila tidak ada pembatasan akan berkembang biak dengan sangat cepat dan memenuhi dengan cepat beberapa bagian dari permukaan bumi.
- b. Manusia untuk hidup memerlukan bahan makanan, sedangkan laju pertumbuhan makanan jauh lebih lambat (deret hitung) dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk (deret ukur).

2. Teori Kependudukan Marxist (Karl & F. Angel)

Aliran ini tidak sependapat dengan Malthus (bila tidak dibatasi penduduk akan kekurangan makanan). Menurut Marxist tekanan penduduk di suatu negara bukanlah tekanan penduduk terhadap bahan makanan, tetapi tekanan terhadap kesempatan kerja (misalnya di negara kapitalis) Marxist juga berpendapat bahwa semakin banyak jumlah manusia semakin tinggi produk yang dihasilkan, jadi dengan demikian tidak perlu diadakan

pembatasan penduduk. Negara-Negara yang mendukung teori Malthus umumnya adalah negara berekonomi kapitalis seperti USA, Inggris, Prancis, Australia, Canada, dll Sedangkan negara-negara yang mendukung teori Marxist umumnya adalah negara-negara berekonomi Sosialis seperti Eropa Timur, RRC, Korea, Rusia dan Vietnam.

Dasar Pegangan Marxist adalah beranjak dari pengalaman bahwa manusia sepanjang sejarah akan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Beda pandangan Marxist dan Maltus adalah pada “*Natural Resource*” tidak bisa dikembangkan atau mengimbangi kecepatan pertumbuhan penduduk. Menurut Marxist tekanan penduduk di suatu negara bukanlah tekanan penduduk terhadap bahan makanan, tetapi tekanan terhadap kesempatan kerja (misalnya di negara kapitalis). Marxist juga berpendapat bahwa semakin banyak jumlah manusia semakin tinggi produk yang dihasilkan, jadi dengan demikian tidak perlu diadakan pembatasan penduduk. Berikut beberapa pendapat aliran Marxis :

- a. Populasi manusia tidak menekan makanan, tapi mempengaruhi kesempatan kerja.
- b. Kemeralatan bukan terjadi karena cepatnya pertumbuhan penduduk, tapi karena kaum kapitalis mengambil sebagian hak para buruh.
- c. Semakin tinggi tingkat populasi manusia, semakin tinggi produktifitasnya, jika teknologi tidak menggantikan tenaga manusia sehingga tidak perlu menekan jumlah kelahirannya, ini berarti ia menolak teori Malthus tentang moral restraint untuk menekan angka kelahiran.

3. Teori Kependudukan Neo-Malthusian (Garreth Hardin & Paul Ehrlich)

Pada abad 20 teori Malthus mulai diperdebatkan kembali. kelompok ini menyokong aliran Malthus, akan tetapi lebih radikal lagi dan aliran ini sangat menganjurkan untuk mengurangi jumlah penduduk dengan menggunakan cara-cara "*Preventif Check*" yaitu menggunakan alat kontrasepsi. Tahun 1960an dan 1970an foto-foto telah diambil dari ruang angkasa dengan menunjukkan bumi terlihat seperti sebuah kapal yang berlaya dengan persediaan bahan bakar dan bahan makanan yang terbatas. Pada suatu saat kapal ini akan kehabisan bahan bakar dan bahan makanan tersebut sehingga akhirnya malapetaka menimpa kapaltersebut. Tahun 1871 Ehrlich menulis buku "*The Population Bomb*" dan kemudian direvisi menjadi "*The Population Explotion*" yang berisi:

- a. Sudah terlalu banyak manusia di bumi ini.
- b. Keadaan bahan makanan sangat terbatas.
- c. Lingkungan rusak sebab populasi manusia meningkat.

Analisis ini dilengkapi oleh Meadow (1972), melalui buku "*The Limit to Growth*" ia menarik hubungan antara variabel lingkungan (penduduk, produksi pertanian, produksi industri, sumber daya alam) dan polusi. Tapi walaupun begitu, malapetaka tidak dapat dihindari, hanya manusia cuma menunggunya, dan membatasi pertumbuhannya sambil mengelola alam dengan baik. Kritikan terhadap Meadow umumnya dilakukan oleh sosiolog yang menyindir Meadow karena tidak mencantumkan variabel sosial-budaya dalam penelitiannya. Karena itu

Mesarovic dan Pestel (1974) merevisi gagasan Meadow & mencantumkan hubungan lingkungan antar kawasan (Edmund Conway, 2015).

4. Teori Kependudukan Kontemporer

a. John Stuart Mill

Seorang ahli filsafat dan ahli ekonomi berkebangsaan Inggris dapat menerima pendapat Malthus mengenai laju pertumbuhan penduduk melampaui laju pertumbuhan bahan makanan sebagai suatu aksioma. Namun demikian dia berpendapat bahwa pada situasi tertentu manusia dapat mempengaruhi perilaku demografinya. Selanjutnya ia mengatakan apabila produktivitas seorang tinggi ia cenderung ingin memiliki keluarga kecil. Dalam situasi seperti ini fertilitas akan rendah. Jadi taraf hidup (standard of living) merupakan determinan fertilitas. Tidaklah benar bahwa kemiskinan tidak dapat dihindarkan (seperti dikatakn Malthus) atau kemiskinan itu disebabkan karena sistem kapitalis (seperti pendapat Marx) dengan mengatakan, kalau suatu waktu di suatu wilayah terjadi kekurangan bahan makanan, maka keadaan ini hanyalah bersifat sementara saja. Pemecahannya ada dua kemungkinan yaitu : mengimpor bahan makanan, atau memindahkan sebagian penduduk wilayah tersebut ke wilayah lain. Memperhatikan bahwa tinggi rendahnya tingkat kelahirann ditentukan oleh manusia itu sendiri, maka Mill menyarankan untuk meningkatkan tingkat golongan yang tidak mampu. Dengan meningkatnya pendidikan penduduk maka secara rasional maka mereka mempertimbangkan perlu tidaknya menambah jumlah anak sesuai dengan karier dan usaha yang ada. Di

sampai itu Mill berpendapat bahwa pentingnya distribusi kekayaan para konglomerat Eropa.

b. Arsene Dumont

Seorang ahli demografi bangsa Perancis yang hidup pada akhir abad ke-19. Pada tahun 1880 dia menulis sebuah artikel berjudul *Depopulation et Civilization*. Ia melancarkan teori penduduk baru yang disebut dengan teori kapilaritas sosial (*theory of social capilarity*). Kapilaritas sosial mengacu kepada keinginan seseorang untuk mencapai kedudukan yang tinggi di masyarakat, misalnya: seorang ayah selalu mengharapkan dan berusaha agar anaknya memperoleh kedudukan sosial ekonomi yang tinggi melebihi apa yang dia sendiri telah mencapainya. Untuk dapat mencapai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat, keluarga yang besar merupakan beban yang berat dan perintang. Konsep ini dibuat berdasarkan atas analogi bahwa cairan akan naik pada sebuah pipa kapiler. Teori kapilaritas sosial dapat berkembang dengan baik pada negara demokrasi, dimana tiap-tiap individu mempunyai kebebasan untuk mencapai kedudukan yang tinggi di masyarakat. Di negara Perancis pada abad ke-19 misalnya, dimana system demokrasi sangat baik, tiap-tiap orang berlomba mencapai kedudukan yang tinggi dan sebagai akibatnya angka kelahiran turun dengan cepat. Di negara sosialis dimana tidak ada kebebasan untuk mencapai kedudukan yang tinggi di masyarakat, system kapilaritas sosial tidak dapat berjalan dengan baik.

c. Emile Durkheim

Seorang ahli sosiologis Perancis yang hidup pada akhir abad ke-19. Apabila Dumont menekankan perhatiannya pada faktor-faktor yang

mempengaruhi pertumbuhan penduduk, maka Durkheim menekankan perhatiannya pada keadaan akibat dari adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi (Weeks, 1992). Ia mengatakan, akibat dari tingginya pertumbuhan penduduk, akan timbul persaingan diantara penduduk untuk dapat mempertahankan hidup. Dalam memenangkan persaingan tiap-tiap tiap-tiap orang berusaha untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan, dan mengambil spesialisasi tertentu, keadaan seperti ini jelas terlihat pada kehidupan masyarakat perkotaan dengan kehidupan yang kompleks. Apabila dibandingkan antara kehidupan masyarakat tradisional dan masyarakat perkotaan, akan terlihat bahwa pada masyarakat tradisional tidak terjadi persaingan dalam memperoleh pekerjaan, tetapi pada masyarakat industri akan terjadi sebaliknya. Hal ini disebabkan ada masyarakat industri tingkat pertumbuhan dan kepadatan penduduknya tinggi.

d. Michael Thomas Sadler dan Doubleday

Kedua ahli ini adalah penganut teori fisiologis. Sadler mengemukakan, bahwa daya reproduksi manusia dibatasi oleh jumlah penduduk yang ada di suatu wilayah atau negara. Jika kepadatan penduduk tinggi, daya reproduksi manusia akan menurun, sebaliknya jika kepadatan penduduk rendah, daya reproduksi manusia akan meningkat. Thomson (1953) meragukan kebenaran teori ini setelah melihat keadaan di Jawa, India dan Cina dimana penduduknya sangat padat, tetapi pertumbuhan penduduknya juga tinggi. Dalam hal ini Malthus lebih konkret argumentasinya dari pada Sadler. Malthus mengatakan bahwa penduduk

disuatu daerah dapat mempunyai tingkat fertilitas yang tinggi, tetapi dalam pertumbuhan alaminya rendah karena tingginya tingkat kematian. Namun demikian, penduduk tidak dapat mempunyai fertilitas tinggi, apabila tidak mempunyai kesuburan (fecunditas) yang tinggi, tetapi penduduk dengan tingkat kesuburan tinggi dapat juga tingkat fertilitasnya rendah. Teori Doubleday hampir sama dengan teori Sadler, hanya titik tolaknya berbeda. Kalau Sadler mengatakan bahwa daya reproduksi penduduk berbanding terbalik dengan tingkat kepadatan penduduk, maka Doubleday berpendapat bahwa daya reproduksi penduduk berbanding terbalik dengan bahan makanan yang tersedia. Jadi kenaikan kemakmuran menyebabkan turunnya daya reproduksi manusia. Jika suatu jenis makhluk diancam bahaya, mereka akan mempertahankan diri dengan segala daya yang mereka miliki. Mereka akan mengimbangnya dengan daya reproduksi yang lebih besar (Iskandar, 1980). Menurut Doubleday, kekurangan bahan makanan akan merupakan perangsang bagi daya reproduksi manusia, sedang kelebihan pangan justru merupakan faktor penegkang perkembangan penduduk. Dalam golongan masyarakat yang berpendapatan rendah, seringkali terdiri dari penduduk dengan keluarga besar, sebaliknya orang yang mempunyai kedudukan yang lebih baik biasanya jumlah keluarganya kecil. Rupa-rupanya teori fisiologis ini banyak diilhami dari teori aksi dan reaksi dalam meninjau perkembangan penduduk suatu negara atau wilayah. Teori ini dapat menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat mortalitas penduduk semakin tinggi pula tingkat produksi manusia.

2.5 Pengangguran

Menurut Sadono Sukirno, pengangguran adalah sebuah kondisi di mana seseorang yang berasal dari golongan angkatan kerja menginginkan untuk mendapatkan pekerjaan akan tetapi masih belum mampu untuk mendapatkannya (Riska Franita, 2016). Tidak semua orang yang tidak atau belum mendapatkan pekerjaan dapat disebut sebagai pengangguran. Seseorang dari golongan angkatan kerja yang memiliki kemauan kerja dan siap kerja, tetapi tidak berusaha untuk mencari pekerjaan dalam empat minggu terakhir, kriteria tersebut tidak dapat digolongkan sebagai pengangguran (Paulus Kurniawan dan Made Kembar Sri Budhi, 2015).

Definisi pengangguran dilihat dari sudut pandang ekonomi tidak identik dengan istilah tidak bekerja. Seseorang yang tidak memiliki kemauan untuk bekerja, tidak dapat digolongkan ke dalam kelompok pengangguran. Seseorang yang memiliki keinginan untuk bekerja dan telah berusaha untuk mencari pekerjaan akan tetapi masih belum bisa mendapatkannya, maka seseorang tersebut baru dapat digolongkan sebagai pengangguran. Pengangguran termasuk ke dalam permasalahan makroekonomi yang dapat memberikan pengaruh terhadap kondisi fisik dan mental seseorang secara langsung. Kondisi seseorang yang sedang menganggur dapat memicu penurunan standar dalam kehidupannya. Selain itu, kondisi menganggur yang berlangsung dalam jangka waktu cukup lama mampu menimbulkan dampak psikologis bagi kebanyakan orang.

Pengangguran dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis. Berikut ini adalah beberapa kategori dari pengangguran:

- a. Pengangguran Friksional, Pengangguran yang digolongkan ke dalam tipe friksional merupakan tenaga kerja pendatang baru yang mencari pekerjaan pertama dan tenaga kerja yang masih bersifat sementara. Hal tersebut terjadi karena tenaga kerja masih tergolong memungkinkan untuk mencari atau berpindah pekerjaan sesuai dengan kepuasan mereka.
- b. Pengangguran Struktural, Pengangguran yang digolongkan ke dalam tipe struktural merupakan tenaga kerja yang menganggur disebabkan oleh kemampuan atau keterampilan kerja yang tidak cocok dan masih belum memenuhi target dari perusahaan tempat pekerja tersebut melamar.
- c. Pengangguran Siklus, Pengangguran yang digolongkan ke dalam tipe siklus merupakan tenaga kerja yang menganggur akibat dari merosotnya siklus bisnis. Ketika perekonomian dalam kondisi resesi atau depresi, situasi tersebut dapat mendorong suatu perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja bagi beberapa karyawannya demi menstabilkan kembali kondisi keuangan perusahaan.
- d. Pengangguran Musiman, Pengangguran yang digolongkan ke dalam tipe musiman merupakan tenaga kerja yang menganggur karena adanya perubahan pola waktu perekrutan tenaga kerja. Pengangguran musiman dapat dimisalkan seperti pekerja tani musim panen, instruktur ski, penjaga pantai dan lain-lain.

Permasalahan ketenagakerjaan merupakan pekerjaan rumah yang rumit bagi setiap negara. Salah satu permasalahan ketenagakerjaan yang sering kali menyita perhatian adalah masalah pengangguran. Hal tersebut tentunya juga dialami oleh Indonesia, sebagai negara dengan angka pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi pada setiap tahunnya. Masalah pengangguran sudah pasti telah akrab

dengan kehidupan Indonesia yang menjadi salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Permasalahan terkait dengan tingginya angka pengangguran dapat memicu munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang terpinggirkan, sehingga dimungkinkan dapat mengganggu stabilitas negara. Oleh karena itu, sangat diperlukan bagi setiap negara, khususnya Indonesia untuk mengetahui berbagai faktor pemicu munculnya masalah pengangguran yaitu orientasi kebijakan pembangunan ekonomi, kebijakan pengembangan Sumber Daya Manusia, daya saing industri dan globalisasi.

A. Teori Pengangguran Klasik

Teori Klasik menjelaskan pandangan bahwa pengangguran dapat dicegah melalui sisi penawaran dan mekanisme harga di pasar bebas supaya menjamin terciptanya permintaan yang akan menyerap semua penawaran. Menurut pandangan klasik, pengangguran terjadi karena mis-alokasi sumber daya yang bersifat sementara karena kemudian dapat diatasi dengan mekanisme harga (Gilarso. 2004). Jadi dalam Teori Klasik jika terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja maka upah akan turun dan hal tersebut mengakibatkan produksi perusahaan menjadi turun. Sehingga permintaan tenaga akan terus meningkat karena perusahaan mampu melakukan perluasan produksi akibat keuntungan yang diperoleh dari rendahnya biaya tadi. Peningkatan tenaga kerja selanjutnya mampu menyerap kelebihan tenaga kerja yang ada di pasar, apabila harga relatif stabil (Tohar. 2000).

B. Teori Pengangguran Keynes

Dalam menanggapi masalah pengangguran Teori Keynes mengatakan hal yang berlawanan dengan Teori Klasik, menurut Teori Keynes

sesungguhnya masalah pengangguran terjadi akibat permintaan agregat yang rendah. Sehingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi bukan disebabkan oleh rendahnya produksi akan tetapi rendahnya konsumsi. Menurut Keynes, hal ini tidak dapat dilimpahkan ke mekanisme pasar bebas. Ketika tenaga kerja meningkat, upah akan turun hal ini akan merugikan bukan menguntungkan, karena penurunan upah berarti menurunkan daya beli masyarakat terhadap barang-barang. Akhirnya produsen akan mengalami kerugian dan tidak dapat menyerap tenaga kerja.

Keynes menganjurkan adanya campur tangan pemerintah dalam mempertahankan tingkat permintaan agregat agar sektor pariwisata dapat menciptakan lapangan pekerjaan (Soesastro, dkk, 2005). Perlu dicermati bahwa pemerintah hanya bertugas untuk menjaga tingkat permintaan agregat, sementara penyedia lapangan kerja adalah sektor wisata. Hal ini memiliki tujuan mempertahankan pendapatan masyarakat agar daya beli masyarakat terjaga. Sehingga tidak memperparah resesi serta diharapkan mampu mengatasi pengangguran akibat resesi.

2.6 Pertumbuhan penduduk

Pertumbuhan penduduk di Indonesiasemakin meningkat. Hal ini membuat pemerintah kewalahan dalam mengatasi pertumbuhan penduduk yang semakin pesat. Dalam ilmu sosiologi, penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu, dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi. Seiring dengan perkembangan zaman, penduduk di seluruh dunia mengalami

perkembangan yang sangat pesat. Termasuk penduduk di Indonesia. Penduduk suatu negara dapat berperan sebagai objek dan subjek di suatu pembangunan. Sebagai objek, artinya penduduk merupakan faktor yang harus dibangun atau ditingkatkan kualitas hidupnya. Sedangkan sebagai subjek penduduk merupakan faktor pelaku proses pembangunan. Penduduk juga dapat diartikan sebagai objek disuatu lokasi atau tempat yang mempunyai peran penting dalam pembangunan di suatu daerah. Penyebab Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk cukup padat. Tidak bisa di pungkiri bahwa laju pertumbuhan penduduk Indonesia begitu pesat dan tidak bisa di hindari, meskipun pemerintah telah melakukan upaya dan berbagai solusi serta berbagai semboyan telah di tawarkan kepada masyarakat namun tetap saja laju pertumbuhan penduduk tidak bisa terbantahkan. Meskipun solusi yang di tawarkan tidak sesuai dengan harapan pemerintah, tapi setidaknya bisa mereduksi sebagian masalah yang ada. Penduduk merupakan unsur penting dalam usaha untuk meningkatkan produksi dan mengembangkan kegiatan ekonomi. Ada beberapa hal yang menyebabkan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia sulit untuk dihindari, di antaranya:

1. Peningkatan angka kelahiran
2. Umur panjang
3. Penurunan angka kematian
4. Kurangnya pendidikan
5. Pengaruh budaya

6. Imigrasi dan emigrasi Secara umum, pertumbuhan penduduk membawa dampak positif bagi manusia.

Beberapa dampak positifnya antara lain sebagai berikut.

1. Tersedianya tenaga kerja untuk meningkatkan produksi dalam memenuhi kebutuhan yang terus meningkat.
2. Bertambahnya kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan sehingga berkembang jumlah dan jenis usaha lokal.
3. Meningkatnya inovasi karena penduduk dipaksa untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya, agar produktivitas lahan pertaniannya meningkat, manusia mengembangkan pupuk dan benih unggul untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang terus meningkat. (subri,2003)

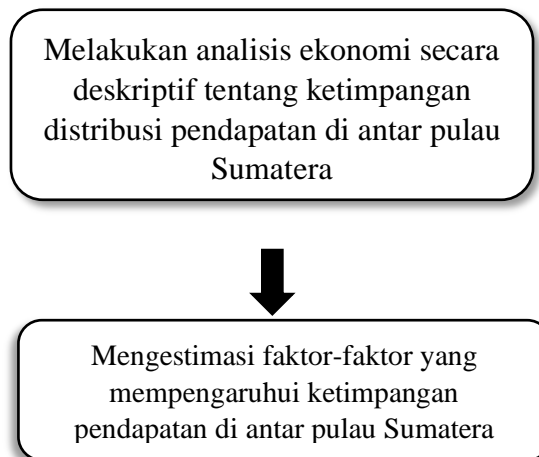
2.7 Penelitian Terdahulu

NO	Nama peneitian/Judul penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Nama : Shita tiara Judul : Analisis ketimpangan distribusi pendapatan di sumatera utara.	Indeks wiliamsens	1. Perkembangan ekonomi yang dilihat dari PDRB per kapita Provinsi Sumatera Utara selama tahun pengamatan menunjukkan adanya tren yang semakin meningkat dilihat dari data tahun terakhir yang merupakan angka tertinggi sebesar 30 482 590,52, adapun menurut kabupaten/kota di Provinsi Sumatera nilai PDRB per kapita selama tahun pengamatan juga mengalami peningkatan nilai PDRB yang tertinggi terdapat di Kota Medan dengan angka 53 623967,96. 2. Ketimpangan distribusi pendapatan Provinsi Sumatera Utara yang dilihat dari Gini Ratio selama tahun pengamatan berada di angka 0,35 yang artinya pembangunan ekonomi dan distribusi pendapatan di Provinsi Sumatera Utara relatif merata, dan nilai Gini Ratio tertinggi menurut kabupaten/kota selama tahun pengamatan terjadi di Samosir dengan angka 0,447.

2	<p>Nama : Rifki Khoirudin Judul : Analisis Determinan ketimpangan pendapatan di daerah istimewa yogyakarta.</p>	<p>Regresi panel, Indeks Wiliamsen</p>	<p>Secara simultan variabel pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, disentralisasi fiskal, dan upah minimum berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota D.I Yogyakarta.</p>
3	<p>Nama : Aufa Oksamulya Judul : Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia.</p>	<p>Regresi panel</p>	<p>1) Pendidikan mempunyai pengaruh secara signifikan dan negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Artinya, apabila pendidikan meningkat maka tingkat ketimpangan pendapatan akan mengalami penurunan. 2) Foreign Direct Investment memiliki pengaruh secara tidak signifikan dan negatif terhadap tingkat ketimpangan pendapatan. Artinya, apabila foreign direct investment meningkat maka ketimpangan pendapatan akan mengalami penurunan.</p>
4	<p>Nama : Andi samsir dan Adul rahman Judul : Menelusur Ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten dan kota</p>	<p>Indeks Wiliamsen/Regresi panel</p>	<p>Selama periode penelitian 2010-2015, terjadi ketimpangan pembangunan yang tidak cukup signifikan berdasarkan Indeks Williamson, sedangkan menurut Indeks entropi Theil, ketimpangan pembangunan boleh dikatakan kecil yang berarti masih terjadinya pemerataan pembangunan setiap tahunnya selama periode pengamatan. Sebagai akibatnya tidak terbuktinya hipotesis Kuznets di Kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan yang mengatakan adanya kurva U terbalik</p>
5	<p>Nama : Samsir, Rahman Judul : , Menelusur Ketimpangan Distirbusi Pendapatan Kabupaten dan Kota</p>	<p>Regresi panel, Indeks Wiliamsen</p>	<p>Selama periode penelitian 2010-2015, terjadi ketimpangan pembangunan yang tidak cukup signifikan berdasarkan Indeks Williamson, sedangkan menurut Indeks entropi Theil, ketimpangan pembangunan boleh dikatakan kecil yang berarti masih terjadinya pemerataan pembangunan setiap tahunnya selama periode pengamatan. Sebagai akibatnya tidak terbuktinya hipotesis Kuznets di Kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan yang mengatakan adanya kurva U terbalik.</p>

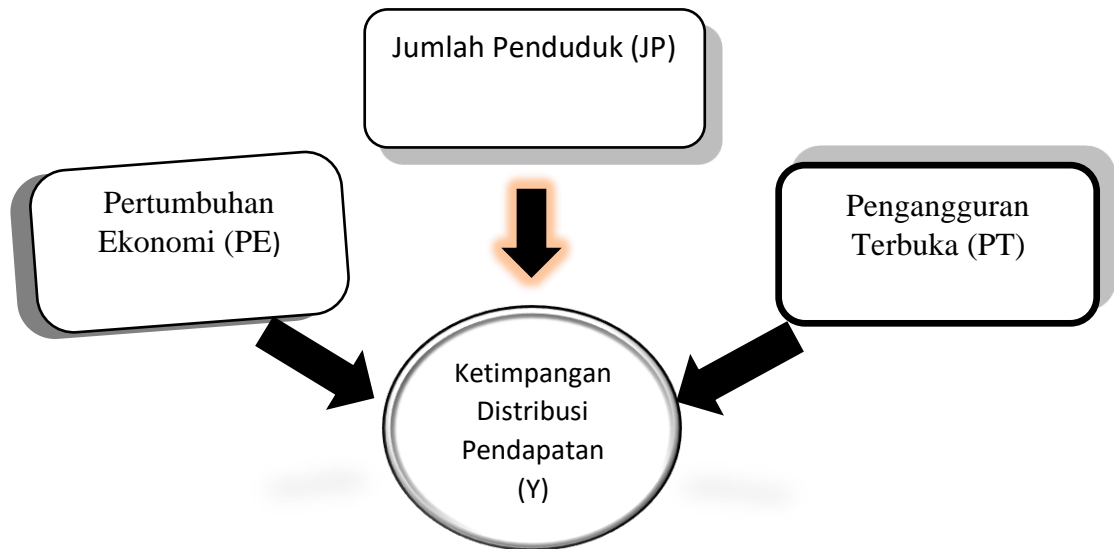
2.8 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan ketimpangan pendapatan dalam pendistribusiannya menyebabkan terjadi kesenjangan antar golongan pendapatan, dimana besar kecilnya pendapatan yang diterima tentu sangat berpengaruh pada pola kehidupan masyarakat yang ada pulau sumatera . Dengan adanya perbedaan dalam pendistribusian pendapatan tingkat pendapatan masyarakat akan berbeda-beda pula pengeluaran tiap keluarga yang pada akhirnya akan berpengaruh pada jumlah pendapatan masing-masing masyarakat sesuai klasifikasi pola mata pencaharian. Hal ini juga akan menjadi pijakan dalam mempertimbangkan bagaimana pendistribusian masyarakat yang ada di Kecamatan pulau sumatera dimana alat analisis yang digunakan yaitu rasio gini dan kurva Lorenz. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut



Gambar 2.4 kerangka konseptual

2.9 Kerangka konseptual model estimasi



Gambar 2.5 Bagan Kerangka Model Estimasi

Dalam Model ini, Variabel Pendapatan Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, dan Pengangguran merupakan variabel bebas yang mempengaruhi secara langsung terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan, yang dimana Ketipangan Distribusi Pendapatan merupakan variabel terikat.

2.10 Hipotesis

Berdasarkan tujuan penelitian, landasan teori dan penelitian-penelitian terdahulu, maka didapat hipotesa sebagai berikut :

1. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara Jumlah Penduduk dan Pengangguran terhadap Ketimpangan Distibusi Pendapatan.
2. Terdapat hubungan negatif dan signifikan antara Pertumbuhan Ekonomi dan pendidikan terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah dengan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode deskripsi ini merupakan metode yang memberikan suatu gambaran atau penjelasan terhadap sebuah isu atau topik. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang didasarkan pada pengumpulan dan analisis data berbentuk angka (numerik) untuk menjelaskan, memprediksi, dan mengontrol fenomena yang diamati. Penelitian kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data numerik yang diolah dengan menggunakan alat bantu kuantitatif berupa *software* computer dalam mengolah data tersebut.

3.2 Definisi Operasional

Defenisi operasional variable merupakan acuan dari tinjauan pustaka yang digunakan untuk melakukan penelitian dimana antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya dapat dihubungkan sehingga penelitian dapat disesuaikan dengan data yang diinginkan. Adapun variabel (bebas) yang terdapat dalam penelitian ini ialah Pertumbuhan Ekonomi, jumlah penduduk, pengangguran dan variabel (terikat) ketimpangan distribusi pendapatan.

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel Model Ekonometrika

Variabel	Definisi operasional	Sumber data	Ket
Ketimpangan Distribusi Pendapatan	kesenjangan pendapatan antara suatu masyarakat dengan angka gini rasio di pulau sumatera	https://www.bps.go.id	Variabel Terikat
Jumlah Penduduk	sekumpulan orang yang bertempat tinggal atau berdomisili di pulau sumatera	https://www.bps.go.id	Variabel Bebas

Pertumbuhan Ekonomi	Proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di pulau sumatera	https://www.bapennas.go.id	Variabel Bebas
Pengangguran	keadaan saat seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja di pulau sumatera	https://www.bps.go.id	Variabel Bebas
Pendidikan	Rata -Rata lama sekolah di pulau sumatera	https://www.bps.go.id	Variabel bebas

3.3 Tempat Dan Waktu Penelitian

3.3.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara Nasional di Indonesia khususnya di wilayah pulau sumatera melalui BPS pulau sumatera .

3.3.1 Waktu Penelitian

Waktu dalam penelitian ini direncanakan selama 3 bulan, mulai dari bulan Maret 2023 sampai dengan Juni 2023.

3.4 Sumber dan Jenis Data

3.4.1 Sumber Data

Sumber data penelitian ini berasal dari Badan Pusat Statistika (BPS), Bapennas

3.4.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam peneltian ini adalah data sekunder berupa *time series* (runtun waktu) dari tahun 2013-2022

3.5 Tempat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengambilan data sekunder melalui Badan Pusat Statistik (BPS), Kemendagri dengan kurun waktu selama 10 tahun dari tahun 2013-2022.

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Analisis Data Panel

Data panel merupakan data yang dikumpulkan secara cross section dan time series. Keuntungan menggunakan data panel, yaitu :

- a. Dengan menggabungkan data time series dan cross section, panel menyediakan data yang lebih banyak dan informasi yang lebih lengkap serta bervariasi. Dengan demikian akan dihasilkan degree of freedom (derajat bebas) yang lebih besar dan mampu meningkatkan presisi dari estimasi yang dilakukan.
- b. Data panel mampu mengakomodasi tingkat heterogenitas individu-individu yang tidak diobservasi namun dapat mempengaruhi hasil dari permodelan (individual heterogeneity). Hal ini tidak dapat dilakukan oleh studi time series maupun cross section sehingga dapat menyebabkan hasil yang diperoleh melalui kedua studi ini akan menjadi bias.
- c. Dapat mengidentifikasi dan mengukur efek yang tidak dapat ditangkap oleh data cross section murni maupun data time series murni.
- d. Data panel dapat digunakan untuk mempelajari kedinamisan data. Artinya dapat digunakan untuk memperoleh informasi bagaimana kondisi individu-individu pada waktu tertentu dibandingkan pada kondisinya pada waktu lainnya.
- e. Data panel memungkinkan untuk membangun dan menguji model yang bersifat lebih rumit dibandingkan data cross section murni maupun data time series murni.

3.6.2 Metode Regresi Data Panel

Permodelan dengan menggunakan teknik data panel dapat dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan alternatif metode pengolahannya. Pendekatan-pendekatan tersebut yaitu metode Common Effect/Pooled Least Square (CEM), metode Fixed Effect (FE), dan metode Random Effect (RE) sebagai berikut :

1. Common Effect/Pooled Least Square (CEM)

Teknik yang digunakan dalam metode ini adalah menggabungkan data time series dan cross section. Dengan menggabungkan kedua jenis data tersebut, maka metode OLS dapat digunakan untuk mengestimasi model data panel. Dalam pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu, dan dapat diasumsikan bahwa perilaku data antar perusahaan sama dalam berbagai rentang waktu. Asumsi ini jelas sangat jauh dari realita sebenarnya karena karakteristik antar perusahaan baik dari segi kewilayahan jelas sangat berbeda.

2. Fixed Effect (FE)

Metode Fixed Effect adalah metode yang akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Program Eviews 9 dengan sendirinya menganjurkan pemakaian model FEM, namun untuk lebih pastinya penulis menguji lagi dengan uji Likelihood Ratio menunjukkan nilai probability Chi square 0,0000 signifikan yang artinya pengujian dengan model FEM paling baik. Metode ini mengasumsikan bahwa terdapat perbedaan antar individu variabel (cross section) dan perbedaan tersebut dapat dilihat melalui perbedaan interceptnya. Keunggulan yang dimiliki metode ini adalah

dapat membedakan efek individu dan efek waktu. Metode ini tidak perlu menggunakan asumsi bahwa komponen error tidak berkorelasi dengan variabel bebas.

3. Random Effect (RE)

Dengan metode ini efek spesifik individu variabel merupakan bagian dari error-term. Model ini berasumsi bahwa error-term akan selalu ada dan mungkin berkorelasi sepanjang time series dan cross section. Metode ini lebih baik digunakan pada data panel apabila jumlah individu lebih besar daripada jumlah kurun waktu yang ada.

3.6.3 Pemilihan Data Panel

Dengan menggunakan program Eviews terdapat beberapa pengujian yang akan membantu untuk menentukan metode apa yang paling efisien digunakan dari ketiga model persamaan tersebut. Dalam penelitian ini hanya menggunakan Uji Chow dan Uji Hausman. Untuk menguji persamaan regresi yang akan diestimasi dapat digunakan pengujian sebagai berikut:

1. Uji Chow

Chow test atau Uji chow yakni pengujian untuk memilih pendekatan terbaik antara model pendekatan Common Effect Model (CEM) dengan Fixed Effect Model (FEM) yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Dengan kriteria pengujian hipotesis :

H_0 = Common Effect Model (CEM)

H_1 = Fixed Effect Model (FEM)

2. Uji Hausman

Untuk memilih data model terbaik antara model pendekatan Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM), maka digunakan Uji Hausman dengan kriteria pengujian hipotesis, yaitu :

H_0 = Random Effect Model (REM)

H_1 = Fixed Effect Model (FEM)

3. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Lagrange Multiplier (LM) adalah uji untuk mengetahui apakah model Random Effect lebih baik daripada Model Common Effect yang paling tepat digunakan. Uji signifikan Random Effect ini dikembangkan oleh Bruesch Pagan. Metode Bruesch Pagan untuk uji signifikan Random effect didasarkan pada nilai residual dari metode OLS. Dengan kriteria pengujian hipotesis :

H_0 = Common Effect Model (CEM)

H_1 = Random Effect Model (REM)

3.6.4 Uji Asumsi Klasik

Metode OLS mendapatkan nilai estimator yang diharapkan dapat memenuhi sifat estimator OLS yang BLUE (*Blue Linear Unbiased Estimator*) dengan cara meminimumkan kuadrat simpangan setiap observasi dalam sampel. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga asumsi dalam metode estimasi OLS yang harus dipenuhi dalam pengujian berdasarkan criteria ekonometrika.

1. Multikolinieritas

Multikolinieritas berhubungan dengan situasi dimana ada linear baik yang pasti atau mendekati pasti antara variabel independen. Masalah multikolinieritas timbul bila variabel-variabel independen berhubungan

satu sama lain. Selain mengurangi kemampuan untuk menjelaskan dan memprediksi, multikolinieritas juga menyebabkan kesalahan baku koefisien (uji t) menjadi indikator yang tidak terpercaya (Gujarati, 2012). Uji multikolinieritas ini bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas saling berhubungan secara linear dalam model persamaan regresi. Apabila terjadi multikolinieritas, akibatnya variabel penafsiran menjadi cenderung terlalu besar, t-hitung tidak bias, namun tidak efisien.

2. Heterokedastisitas

Heterokedastisitas adalah keadaan dimana varians dari setiap gangguan tidakkonstan. Dampak adanya hal tersebut adalah tidak efisiennya proses estimasi, sementara hasil estimasinya sendiri tetap konsisten dan tidak bias serta akan mengakibatkan hasil uji t dan uji f dapat menjadi tidak “*reliable*” atau tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat digunakan Uji White. Secara manual uji ini dilakukan dengan melakukan regresi kuadrat dengan variabel bebas kuadrat dan perkalian variabel bebas. Nilai R^2 yang didapat digunakan untuk menghitung χ^2 , dimana $\chi^2 = n \cdot R^2$ (Gujarati, 2012). Dimana pengujiannya adalah jika nilai probability Observation R-Squared lebih besar dari taraf nyata 5%, Maka hipotesis alternatif adanya heteroskedastisitas dalam model ditolak.

3. Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana variabel gangguan pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel pada periode lainnya, dengankata

lain variabel gangguan tidak random. Faktor-faktor yang menyebabkan autokorelasi antara lain kesalahan dalam menentukan model, menggunakan lag pada model memasukkan variabel yang penting. Akibat dari adanya autokorelasi adalah parameter bias dan variannya minimum, sehingga tidak efisien (Gujarati, 2012).

Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi salah satunya diketahui dengan melakukan Uji *Durbin Watson Test*. Dimana apabila di dan du adalah batas bawah dan batas atas, statistik menjelaskan apabila nilai *Durbin Watson* berada pada $2 < DW < 4$ -du maka autokorelasi atau *no-autocorrelation* (Gujarati, 2012).

3.6.5 Model Estimasi

Penelitian ini mengenai faktor yang mempengaruhi kemiskinan dengan menggunakan data times series yaitu data runtun waktu 10 tahun (dari tahun 2012 sampai 2022), model ekonometrika pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 \text{PND}_{rt} + \beta_2 \text{TPT}_{rt} + \beta_3 \text{PE}_{rt} + \beta_4 \text{Pendidikan}_{rt} + e$$

Dimana :

Y = Ketimpangan Distribusi Pendapatan

PND = Jumlah penduduk

PE = Pertumbuhan Ekonomi

TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka

Pendidikan = Rata-Rata lama Sekolah

β_0 = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien

e = term of error

3.6.6 Uji Hipotesis

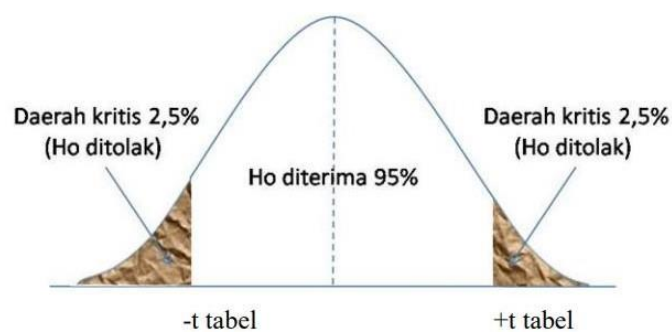
1. Uji Parsial (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat (Gujarati, 2012). Uji t dilakukan untuk melihat signifikan dari pengaruh P_e , J_p dan P_t secara *individual* terhadap Y . Dalam hal ini pengujian dilakukan adalah sebagai berikut: Perumusan Hipotesis

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ (tidak ada hubungan yang signifikan antara masing-masing variabel produk domestik regional bruto, jumlah penduduk, pengangguran dan pendidikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Sumatera).

$H_a \neq \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$ (ada hubungan yang signifikan antara masing-masing variabel produk domestik regional bruto, jumlah penduduk, pengangguran dan pendidikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Sumatera).

Terima H_0 jika $-t_{tabel} < t_{hitung} < +t_{tabel}$, hal lain tolak H_0 atau dalam distribusi kurva normal t dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3.2 Uji t-hitung

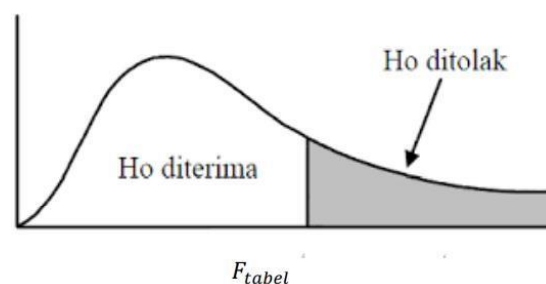
2. Uji Simultan (Uji F)

Digunakan untuk mengetahui pada model produk domestik regional bruto, jumlah penduduk dan pengangguran secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Distribusi pendapatan Dengan langkah Langkah sebagai berikut : Perumusan Hipotesis

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ (tidak ada hubungan yang signifikan secara serentak antara variabel variabel produk domestik regional bruto, Jumlah penduduk, pengangguran dan pendidikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Sumatera).

$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$ (ada hubungan yang signifikan secara serentak antara variabel produk domestik regional bruto, jumlah penduduk, pengangguran dan pendidikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Sumatera).

Terima jika H_0 jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, hal lain tolak H_0 . Atau dalam distribusi kurva F dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3. 3 Uji f-hitung

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian

Pulau Sumatera, berdasarkan luas merupakan pulau terbesar keenam di dunia. Pulau ini membujur dari barat laut ke arah tenggara dan melintasi khatulistiwa, seolah membagi pulau Sumatera atas dua bagian, Sumatera belahan bumi utara dan Sumatera belahan bumi selatan. Pegunungan Bukit Barisan dengan beberapa puncaknya yang melebihi 3.000 m di atas permukaan laut, merupakan barisan gunung berapi aktif, membentang sepanjang sisi barat pulau dari ujung utara ke arah selatan; sehingga membuat dataran di sisi barat pulau relatif sempit dengan pantai yang terjal dan dalam ke arah Samudra Hindia dan dataran di sisi timur pulau yang luas dan landai dengan pantai yang landai dan dangkal ke arah Selat Malaka, Selat Bangka dan Laut China Selatan. Di bagian utara Pulau Sumatera berbatasan dengan Laut Andaman dan di bagian selatan dengan Selat Sunda. Pulau Sumatera ditutupi oleh hutan tropik primer dan hutan tropik sekunder yang lebat dengan tanah yang subur. Gunung berapi yang tertinggi di Sumatera adalah Gunung Kerinci di Jambi, dan dengan gunung berapi lainnya yang cukup terkenal yaitu Gunung Leuser di Aceh dan Gunung Dempo di perbatasan Sumatera Selatan dengan Bengkulu. Pulau Sumatera merupakan kawasan episentrum gempa bumi karena dilintasi oleh patahan kerak bumi disepanjang Bukit Barisan, yang disebut Patahan Sumatera; dan patahan kerak bumi di dasar Samudra Hindia disepanjang lepas pantai sisi barat Sumatera. Danau terbesar di Indonesia, Danau Toba terdapat di Pulau Sumatera.

4.1.1. Kondisi Geografi Pulau Sumatera

Pulau Sumatera terletak dibagian barat gugusan kepulauan Indonesia. Secara Geografis Pulau Sumatera berada di posisi 6°LU-6°LS dan antara 95°BB-109°BT. Di sebelah utara berbatasan dengan Teluk Benggala, di sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka, di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda dan di sebelah barat dengan Samudra Hindia.



Sumber : Kementerian PUPR

Gambar 4.1. Peta Pulau Sumatera

Sumatera dengan luas 473.481 km², terletak di bagian barat gugusan kepulauan Nusantara. Di sebelah timur pulau, banyak dijumpai rawa yang dialiri oleh sungai-sungai besar yang bermuara di sana, antara lain Asahan (Sumatera Utara), Sungai Siak (Riau), Kampar, Inderagiri (Sumatera Barat, Riau), Batang Hari (Sumatera Barat, Jambi) , Musi, Ogan, Lematang, Komering (Sumatera Selatan), Way Sekampung, Way Tulangbawang, Way Seputih dan Way Mesuji

(Lampung). Sementara beberapa sungai yang bermuara ke pesisir barat pulau Sumatera di antaranya Batang Tarusan (Sumatera Barat) dan Ketahun (Bengkulu).

Di bagian barat pulau, terbentang pegunungan Bukit Barisan yang membujur dari barat laut ke arah tenggara dengan panjang lebih kurang 1.500 km. Sepanjang bukit barisan tersebut terdapat puluhan gunung, baik yang tidak aktif maupun gunung berapi yang masih aktif, di Pulau Sumatera juga terdapat beberapa danau, di antaranya Danau Laut Tawar (Aceh), Danau Toba (Sumatera Utara), Danau Singkarak, Danau Maninjau, Danau Diatas, Danau Dibawah, Danau Talang (Sumatera Barat), Danau Kerinci (Jambi) dan Danau Ranau (Lampung dan Sumatera Selatan).

4.1.2. Kondisi Demografi Pulau Sumatera

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Provinsi di Pulau Sumatera Sensus Penduduk 2020 (Jiwa)

Provinsi	Jumlah
Aceh	5 274 871
Sumatera Utara	14 799 361
Sumatera Barat	5 534 472
Riau	6 394 087
Jambi	3 548 228
Sumatera Selatan	8 467 432
Bengkulu	2 010 670
Lampung	9 007 848
Kep. Bangka Belitung	1 455 678
Kep. Riau	2 064 564

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan data diatas dapat terlihat provinsi di pulau Sumatera dengan jumlah penduduk paling banyak adalah provinsi Sumatera Utara dengan total 14.799.361 jiwa, di urutan kedua ditempati oleh provinsi Lampung dengan jumlah

penduduk sebanyak 9.007.848 jiwa. Selanjutnya, provinsi Sumatera Selatan dengan jumlah penduduk sebanyak 8.467.432 jiwa. Sedangkan provinsi dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah provinsi Kep. Bangka Belitung dengan jumlah penduduk sebanyak 1.455.678 jiwa.

Jumlah penduduk yang cukup besar di Pulau Sumatera dapat menjadi potensi ataupun permasalahan jika tidak dibarengi dengan kualitas yang baik. Pembangunan manusia menjadi satu diantara tolak ukur pembangunan yang ada di suatu wilayah. Dengan demikian maka indeks pembangunan manusia merupakan alat ukur yang sangat baik untuk melihat pembangunan di suatu wilayah. Berikut adalah nilai indeks pembangunan manusia di Pulau Sumatera :

Tabel 4. 2 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2019 - 2022

Provinsi	2022	2021	2020	2019
Aceh	72.80	72.18	71.99	71.90
Sumatera Utara	72.71	72	71.77	71.74
Sumatera Barat	73.26	72.65	72.38	72.39
Riau	73.52	72.94	72.71	73
Jambi	72.14	71.63	71.29	71.26
Sumatera Selatan	70.90	70.24	70.01	70.02
Bengkulu	72.16	71.64	71.40	71.21
Lampung	70.45	69.90	69.69	69.57
Kep. Bangka Belitung	72.24	71.69	71.47	71.30
Kep. Riau	76.46	75.79	75.59	75.48

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi di pulau Sumatera paling tinggi ditempati oleh provinsi Kepulauan Riau dengan rata-rata nilai IPM yaitu bernilai 75. Dimana, pada tahun 2019 nilai IPM Kepulauan Riau mencapai 75.48, pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 75.59 hingga pada tahun 2022 mencapai 76.46. Provinsi kedua

dengan nilai IPM tertinggi di pulau Sumatera adalah provinsi Riau. Dimana, pada tahun 2019 nilai IPM provinsi Riau bernilai 73 dan pada tahun 2022 nilai IPM provinsi Riau menjadi 73.52. Sedangkan, provinsi dengan nilai IPM paling rendah adalah provinsi Lampung. Dimana, pada tahun 2019 nilai IPM provinsi Lampung sebesar 69.57 dan pada tahun 2022 nilai IPM provinsi Lampung menjadi 70.24, angka ini masih dibawah rata-rata nilai IPM provinsi di pulau Sumatera.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Ketimpangan Pendapatan Antar Provinsi di Pulau Sumatera

1. Gini Rasio

Ketimpangan pendapatan adalah perbedaan pendapatan yang dihasilkan masyarakat sehingga terjadi perbedaan pendapatan yang mencolok dalam masyarakat (Todaro, 2003). Akibatnya yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Salah satu indikator utama untuk melihat ketimpangan di suatu wilayah adalah menggunakan Indeks Gini (*Gini Ratio*). Berikut ini merupakan data *Gini Ratio* provinsi yang ada di Pulau Sumatera.

Tabel 4. 3 ini Ratio Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2017 – 2022

Provinsi	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ACEH	0.291	0.323	0.319	0.318	0.318	0.329
SUMATERA UTARA	0.326	0.313	0.314	0.315	0.311	0.335
SUMATERA BARAT	0.292	0.300	0.301	0.307	0.305	0.312
RIAU	0.323	0.327	0.321	0.331	0.347	0.325
JAMBI	0.335	0.315	0.316	0.324	0.335	0.334
SUMATERA SELATAN	0.330	0.340	0.338	0.339	0.341	0.365
BENGKULU	0.315	0.321	0.323	0.329	0.355	0.349
LAMPUNG	0.313	0.314	0.320	0.331	0.331	0.333
KEP. BANGKA BELITUNG	0.255	0.247	0.257	0.262	0.262	0.276
KEP. RIAU	0.325	0.339	0.334	0.337	0.337	0.359

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Aceh	2.90	2.95	2.85	2.58	2.80	0.78	0.81	0.83	0.67	0.72
Sumatera Utara	1.41	1.45	1.60	1.48	1.46	0.34	0.38	0.45	0.37	0.33
Sumatera Barat	0.86	0.96	0.99	0.78	0.96	0.17	0.23	0.26	0.15	0.21
Riau	0.97	1.09	1.32	1.11	1.05	0.19	0.28	0.43	0.25	0.24
Jambi	1.19	1.09	1.18	1.17	1.26	0.24	0.23	0.27	0.26	0.31
Sumatera Selatan	1.79	2.33	2.26	2.14	2.06	0.39	0.64	0.63	0.52	0.50
Bengkulu	2.17	2.45	2.51	2.01	2.35	0.47	0.55	0.64	0.45	0.51
Lampung	1.70	1.85	2.11	1.99	2.06	0.39	0.38	0.57	0.44	0.48
Kep. Bangka Belitung	0.43	0.56	0.77	0.57	0.73	0.06	0.11	0.17	0.12	0.15
Kep. Riau	0.89	0.95	1.21	0.90	0.59	0.19	0.22	0.42	0.18	0.1

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan urutan ranking indeks kedalaman di Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat 2 Provinsi yang memiliki indeks kedalaman kemiskinan tertinggi di pulau Sumatera yaitu provinsi Aceh dan provinsi Bengkulu. Dimana, nilai indeks kedalaman kemiskinan provinsi Aceh menjadi yang paling tinggi di pulau Sumatera dengan nilai 2,90% sedangkan provinsi Bengkulu berada di urutan kedua dengan nilai indeks kedalaman kemiskinan bernilai 2,17%. Provinsi di pulau Sumatera yang memiliki indeks kedalaman kemiskinan paling rendah adalah provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nilai 0,43%. Selanjutnya, diikuti oleh provinsi provinsi Sumatera Barat dengan nilai indeks kedalaman kemiskinan bernilai 0,86%.

Inflasi merupakan salah satu dalang meningkatnya jumlah warga miskin di provinsi Aceh. Disamping itu, menurut Bappenas tingginya penduduk miskin di Aceh karena total penduduk di wilayah tersebut lebih sedikit dibandingkan daerah lain di Sumatera. Lebih lanjut, optimalisasi sumber daya alam masih sangat rendah seperti kopi yang sebenarnya menjadi komoditas yang sangat digemari dunia.

Produk-produk masyarakat Aceh cenderung di jual pada saat belum diolah (bahan mentah) sehingga tidak memiliki nilai jual tinggi. Hasil olahan masyarakat

Aceh terutama kopi juga masih banyak didominasi oleh pasaran melalui Medan sehingga kontrol harga belum optimal. Kebiasaan masyarakat Aceh yang lebih menyukai investasi daripada meningkatkan konsumsi sehari-hari juga mempengaruhi profil pengeluaran masyarakat Aceh. Dimana, kemiskinan dipengaruhi oleh pola konsumsi masyarakat sehingga tingkat kemiskinan masyarakat Aceh cukup tinggi.

Pada provinsi Bengkulu, kemiskinan Bengkulu disebabkan oleh perekonomian provinsi Bengkulu masih bergantung pada sektor pertanian sehingga perekonomian Bengkulu masih tergolong miskin. Kondisi perekonomian yang bergantung pada pertanian ini menyebabkan ekonomi provinsi Bengkulu sangat rentan karena sangat bergantung pada siklus panen pertanian. Akan tetapi, saat ini provinsi Bengkulu sudah mulai beralih ke sektor yang lebih modern seperti industri dan perdagangan dalam memacu percepatan perekonomian Bengkulu.

Apabila dilihat dari *tren* rata-rata Indeks Keparahan Kemiskinan provinsi di pulau Sumatera, provinsi-provinsi di pulau Sumatera mengalami tren penurunan. Hal tersebut dapat diambil contoh dari provinsi Aceh dimana, pada tahun 2020 indeks keparahan kemiskinan mencapai 0,83% dan mengalami penurunan menjadi 0,81% pada tahun 2021 dan 0,78% pada tahun 2022. Akan tetapi, meskipun provinsi Aceh mengalami penurunan indeks keparahan kemiskinan, provinsi Aceh masih menjadi provinsi dengan nilai indeks keparahan kemiskinan paling tinggi di pulau Sumatera sejak tahun 2018 – 2022. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembangunan di provinsi Aceh belum maksimal dalam mengentaskan kemiskinan. Lebih lanjut, apabila dilihat dari provinsi yang memiliki indeks kemiskinan paling

rendah adalah provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nilai indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,06% pada tahun 2022.

4.2.2 Hasil Penelitian Faktor Yang Meyebabkan Ketimpangan Pendapatan Antar Provinsi Di Pulau Sumatera

1. Model Regresi Data Panel

Regresi data panel dapat dilakukan dengan menguji tiga model analisis yaitu *common*, *fixed*, dan *random effect*. Masing-masing model memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pemilihan model tergantung pada asumsi yang dipakai peneliti dan pemenuhan syarat-syarat pengolahan data statistik yang benar, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara statistik. Oleh karena itu pertama-tama yang harus dilakukan adalah memilih model yang tepat dari ketiga model yang ada.

Tabel 4.1 Metode Regresi Data Panel

Dependent Variable: GINI				
Method: Panel Least Squares (cross-section common effect)				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.333614	0.033993	9.814223	0.0000
PND	2.84E-10	7.50E-10	0.378975	0.7055
TPT	0.004961	0.002090	2.373693	0.0194
PE	0.004509	0.001348	3.343951	0.0011
PENDIDIKAN	-0.005790	0.004133	-1.400935	0.1642
Method: Panel Least Squares (cross-section fixed effect)				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.517636	0.034878	14.84149	0.0000
PND	-4.82E-11	1.29E-09	-0.037254	0.9704
TPT	-0.000550	0.001819	-0.302100	0.7632
PE	0.002238	0.000891	2.511177	0.0137
PENDIDIKAN	-0.022274	0.003423	-6.507930	0.0000
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.497912	0.034735	14.33474	0.0000
PND	4.19E-11	1.17E-09	0.035772	0.9715
TPT	0.000278	0.001756	0.158480	0.8744
PE	0.002508	0.000878	2.857857	0.0051
PENDIDIKAN	-0.020707	0.003316	-6.244936	0.0000

Sumber: Hasil Data Olah Eviews (2023)

2. Pemilihan Model Regresi

Setelah hasil regresi dengan menggunakan model *common*, *random* dan *fixed* didapat, maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji untuk menentukan model estimasi mana yang lebih tepat antara model *common*, *random* atau *fixed*. Dalam menentukan diantara tiga model tersebut maka digunakan uji *chow*, *hausman* dan *langrange* sebagai uji pemilihan model regresi data panel.

Tabel 4.2 Pemilihan Regresi Data Panel

Hasil Uji Chow			
Redundant Fixed Effects Tests			
Cross-section Chi-square	141.969756	9	0.0000
Hasil Uji Hausman			
Correlated Random Effects - Hausman Test			
Cross-section random	4.211686	4	0.3781
Hasil Uji Langrange			
Lagrange Multiplier Tests for Random Effects			
Breusch-Pagan	(0.0000)	(0.4386)	(0.0000)

Sumber: Hasil Data Olah Eviews (2023)

Hasil dari uji *Chow* pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai probabilitas *Cross-section Chi-square* adalah $0.000 < 0,05$ maka model yang valid dipilih yaitu model *Fixed effect*. Karena pada uji *chow* yang dipilih menggunakan model *Fixed*, maka perlu melakukan pengujian lanjutan dengan uji *hausman* untuk menentukan model *fixed effect* atau *random effect* yang digunakan. Pada hasil tabel menunjukkan nilai probabilitas *cross-section random* sebesar 0.3781 lebih besar dari 0,05, artinya pada hasil uji *hausman* memilih menggunakan model *random effect*. Karena pada uji *Hausman* yang dipilih menggunakan model *random*, maka perlu melakukan pengujian lanjutan dengan uji *Lagrange* untuk menentukan model *common effect* atau *random effect* yang digunakan.

Berdasarkan tabel diatas *P-Value Cross Section Breusch Pagan* $< 0,05$ yaitu $0,0000 < 0,05$. Berarti metode terbaik yang harus digunakan dalam penelitian ini adalah *model random effect* daripada *common effect*. Karena berdasarkan pemilihan metode estimasi diketahui bahwa hasil pemilihan metode estimasi yang sesuai untuk persamaan regresi data panel dalam penelitian ini adalah *random effect* (RE).

3. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang pertama ataupun yang kedua terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Syarat model regresi yang baik adalah seharusnya terbebas dari multikolinearitas. Uji multikolinearitas antar variabel dapat diidentifikasi dengan menggunakan nilai korelasi antar variabel independen. Ghazali (2020) menyatakan terdapat dasar pengambilan keputusan uji multikonearitas yaitu sebagai berikut:

- a. Jika nilai korelasi $> 0,80$ maka H_0 ditolak, sehingga ada masalah multikolinearitas.
- b. Jika nilai korelasi $< 0,80$ maka H_0 diterima, sehingga tidak ada masalah multikolinearitas.

Tabel 4.3 Uji Multikolinearitas

	GINI	PND	TPT	PE	PENDIDIKAN
GINI	1.000000	0.040302	0.072859	0.270376	-0.099296
PND	0.040302	1.000000	0.108556	-0.040898	0.063526
TPT	0.072859	0.108556	1.000000	-0.361066	0.494129
PE	0.270376	-0.040898	-0.361066	1.000000	-0.251201
PENDIDIKAN	-0.099296	0.063526	0.494129	-0.251201	1.000000

Sumber: Hasil Data Olah Eviews (2023)

Hasil uji multikonearitas pada tabel diatas menunjukkan bahwa diperoleh nilai korelasi pada seluruh variabel di bawah / lebih kecil dari 0,80.

Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

2. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual satu pengamatan yang lain tetap, maka disebut terjadi heterokedastisitas dan jika berbeda disebut tidak terjadi heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Glesjer. Uji Glejser adalah meregresikan nilai absolute residual terhadap variabel independen. Menurut Ghozali. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji heterokedastisitas yaitu sebagai berikut (Ghozali, 2020):

- a. Jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka H_a ditolak, H_0 diterima yang artinya tidak ada masalah heterokedastisitas.
- b. Jika nilai probabilitas $< 0,05$, maka H_0 ditolak, H_a diterima yang artinya ada masalah heterokedastisitas.

Tabel 4.4 Uji Heterokedastisitas

Panel Period Heteroskedasticity LR Test			
Equation: UNTITLED			
Specification: GINI C PND TPT PE PENDIDIKAN			
Null hypothesis: Residuals are homoskedastic			
	Value	df	Probability
Likelihood ratio	8.335428	10	0.5961
LR test summary:			
	Value	df	
Restricted LogL	236.3749	105	
Unrestricted LogL	240.5426	105	

Sumber: Hasil Data Olah Eviews (2023)

Hasil uji heterokedstisitas pada tabel diatas menunjukkan bahwa diperoleh nilai Likelihood ratio pada penelitian ini di bawah / lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat gejala heterokedstisitas antar variabel independen dalam model regresi.

4. Analisis Regresi Data Panel

Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan data panel untuk mengetahui gambaran mengenai pengaruh belanja daerah, inflasi dan suku bunga terhadap penanaman modal dalam negeri. Pada pemilihan metode estimasi di bagian sebelumnya, dapat dilihat bahwa metode estimasi yang terbaik digunakan dalam penelitian ini adalah *random effect model* (REM). Sehingga hasil analisis regresi data panel dengan menggunakan metode *random effect* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Regresi Linear dengan Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.497912	0.034735	14.33474	0.0000
PND	4.19E-11	1.17E-09	0.035772	0.9715
TPT	0.000278	0.001756	0.158480	0.8744
PE	0.002508	0.000878	2.857857	0.0051
PENDIDIKAN	-0.020707	0.003316	-6.244936	0.0000
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.030075	0.7828
Idiosyncratic random			0.015843	0.2172
Weighted Statistics				
Root MSE	0.015494	R-squared	0.403943	
Mean dependent var	0.051951	Adjusted R-squared	0.381237	
S.D. dependent var	0.020161	S.E. of regression	0.015859	
Sum squared resid	0.026407	F-statistic	17.78944	
Durbin-Watson stat	1.614250	Prob(F-statistic)	0.000000	
Unweighted Statistics				
R-squared	-0.145269	Mean dependent var	0.331191	
Sum squared resid	0.114510	Durbin-Watson stat	0.372260	

Sumber: Hasil Data Olah Eviews (2023)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui persamaan regresi linier yang di hasilkan, yaitu:

$$Y = 0.497912 + 4,19E-11PND_{rt} + 0,000278 TPT_{rt} + 0.002508 PE_{rt} + - 0,020707 Pendidikan_{rt} + e$$

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta (c) = 0.497912 menunjukkan nilai konstan, dimana jika nilai seluruh variabel independen sama dengan nol, maka variabel Ketimpangan Pendapaan (Y) sama dengan 0.497912.
2. Koefisien Jumlah Penduduk (X1) adalah sebesar 4,19E-11, artinya berdasarkan penelitian ini jika variabel lain nilainya nol dan Jumlah Penduduk mengalami kenaikan 1 jiwa maka Ketimpangan Pendapatan akan mengalami kenaikan sebesar 4,19E-11 persen. Nilai *unstandardized coefficients* B bernilai positif, menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang positif antara Jumlah Penduduk (X1) dengan Ketimpangan Pendapatan (Y).
3. Koefisien Tingkat Pengangguran Terbuka (X2) adalah sebesar 0,000278 persen, artinya berdasarkan penelitian ini jika variabel lain nilainya nol dan Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami kenaikan 1 persen maka Ketimpangan Pendapatan akan mengalami Kenaikan sebesar 0,000278 persen. Nilai *unstandardized coefficients* B bernilai positif, menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang searah antara Tingkat Pengangguran Terbuka (X2) dengan Ketimpangan Pendapatan (Y).
4. Koefisien Pertumbuhan Ekonomi (X3) adalah sebesar 0.002508, artinya berdasarkan penelitian ini jika variabel lain nilainya nol dan Pertumbuhan Ekonomi mengalami kenaikan 1 persen maka ketimpangan Pendapatan akan

mengalami kenaikan sebesar 0.002508 persen. Nilai *unstandardized coefficients* B bernilai positif, menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang searah antara Pertumbuhan Ekonomi (X3) dengan Ketimpangan Pendapatan (Y).

5. Koefisien Pendidikan (X4) adalah sebesar -0,020707, artinya berdasarkan penelitian ini jika variabel lain nilainya nol dan pendidikan mengalami kenaikan 1 persen maka ketimpangan Pendapatan akan mengalami penurunan sebesar 0,020707 persen. Nilai *unstandardized coefficients* B bernilai negatif, menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang negatif antara pendidikan (X4) dengan Ketimpangan Pendapatan (Y).

6. Uji Hipotesis

1. Uji T (Parsial)

Uji t bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Berikut ini kriteria untuk pengambilan keputusan dalam penelitian ini:

- a. Jika nilai signifikan t statistik $> 0,05$ maka suatu variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai signifikan t statistik $< 0,05$, maka suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

Berdasarkan angka dengan ketentuan $= 0,05$ dan dk (n-2) atau (110-2) = 108 sehingga diperoleh nilai 1.98217, berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui pengaruh masing-masing variabel sebagai berikut:

- a. Jumlah Penduduk (X1) memiliki nilai signifikan sebesar $0.9715 > 0,05$ dengan t hitung sebesar $0.035772 < 1.98217$, artinya Jumlah Penduduk secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan (Y).
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (X2) memiliki nilai signifikan sebesar $0.8744 > 0,05$ dengan t hitung sebesar $0.158480 < 1.98217$, artinya Tingkat Pengangguran Terbuka secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan.
- c. Pertumbuhan Ekonomi (X3) memiliki nilai signifikan sebesar $0,0051 < 0,05$ dengan t hitung $2.857857 > 1.98217$, artinya Pertumbuhan Ekonomi secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Pendapatan.
- d. Pendidikan (X4) memiliki nilai signifikan sebesar $0,0000 < 0,05$ dengan t hitung $-6.244936 > 1.98217$, artinya pendidikan secara parsial memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pendapatan.

2. Uji F (Simultan)

Uji F dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen (Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Pertumbuhan Ekonomi) secara simultan terhadap variable dependen (Ketimpangan Pendapatan)

Tabel 4.6 Uji Simultan (F)

Dependent Variable: GINI	
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)	
F-statistic	17.78944
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Hasil Data Olah Eviews (2023)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa $F_{\text{tabel}} = 2.69$ dan nilai F_{hitung} sebesar 17.78944. Karena $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ yaitu $17.78944 > 2.69$ maka dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Pertumbuhan Ekonomi dan pendidikan berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap Ketimpangan Pendapatan.

3. Uji Koefisien Determinasi

Uji Koefisien Korelasi yaitu Hubungan liner antar dua variabel biasanya dilambangkan dengan huruf r dimana bervariasi antara -1 sampai +1 menunjukkan hubungan yang kuat antara dua variabel tersebut nilai r yang mendekati 0 mengindikasikan lemahnya hubungan antara dua variabel tersebut.

Tabel 4.7 Uji Koefisien Determinasi

Dependent Variable: GINI	
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)	
R-squared	0.403943
Adjusted R-squared	0.381237

Sumber: Hasil Data Olah Eviews (2023)

Dari tabel diatas besarnya angka $R\text{-Square}$ (R^2) adalah 0.403943. Hal ini menunjukkan bahwa persentase variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 40.39% atau dapat diartikan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model yaitu Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi dan pendidikan mampu menjelaskan sebesar 40.39% terhadap variabel dependennya yaitu Ketimpangan Pendapatan. Sedangkan sisanya 59,61% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model regresi tersebut.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Ketimpangan Pendapatan Antar Provinsi di Pulau Sumatera

Ketimpangan pendapatan dapat diartikan mengenai adanya perbedaan pendapatan yang berbeda antar warga, dari pendapatan yang relative tinggi dan rendah pendapatan itu sendiri bisa menjadi tolak ukur sebuah masalah apakah negara tersebut negara yang maju ataupun berkembang karena pengaruh dari ketimpangan itu sendiri akan mempengaruhi keberlangsungan pembangunan yang di suatu daerah bahkan suatu negara, khususnya pembangunan pada sektor bidang ekonomi (Palupi & Hendiarto, 2018). Ketimpangan pendapatan pada setiap daerah kabupaten kota mengharuskan setiap daerah untuk mampu mengelola sendiri setiap potensi masing-masing, potensi setiap daerah dimiliki secara tepat, hal itu dapat sebagai salah satu dorongan akan pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut (Murialti, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa rata-rata *Gini Ratio* provinsi di pulau Sumatera masih berada di bawah angka 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa provinsi di pulau Sumatera tidak terjadi ketimpangan yang terlalu besar. Apabila dilihat dari data 2022, ketimpangan paling tinggi terjadi di provinsi Jambi dengan nilai *gini ratio* sebesar 0,335. Nilai ini lebih tinggi dari provinsi-prprovinsi lainnya yang ada di pulau Sumatera. Dimana, urutan kedua ditempati oleh provinsi Sumatera Selatan dengan nilai *gini ratio* 0,330. Kemudian, disusul oleh provinsi Kepulauan Riau dengan nilai *gini ratio* sebesar 0,325. Sedangkan, apabila dilihat dari nilai *gini ratio* paling rendah terdapat di provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nilai *gini ratio* bernilai 0,225. Nilai ini menjadi nilai yang terendah diantara provinsi di pulau Sumatera dalam periode tahun 2022.

Ketimpangan timbul dikarenakan tidak adanya pemerataan dalam pembangunan ekonomi. Ketidakmerataan pembangunan ini disebabkan karena adanya perbedaan antara wilayah satu dengan lainnya. Hal ini terlihat dengan adanya wilayah yang maju dengan wilayah yang terbelakang atau kurang maju. Berkembangnya propinsi-propinsi baru sejak tahun 2000an di Sumatera dan desentralisasi diduga akan mendorong ketimpangan antar daerah yang lebih lebar (Yeniwati, 2013).

Ketimpangan memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari adanya ketimpangan adalah dapat mendorong wilayah lain yang kurang maju untuk dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya guna meningkatkan kesejahteraannya. Sedangkan dampak negatif dari ketimpangan yang ekstrim antara lain inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil (Todaro, 2003).

4.3.2 Faktor Yang Meyebabkan Ketimpangan Pendapatan Antar Provinsi Di Pulau Sumatera

Salah satu permasalahan dalam perekonomian suatu negara yang sulit untuk dihindari yaitu ketimpangan pembangunan wilayah. Di Indonesia, ketimpangan pembangunan wilayah menjadi isu strategis yang dibahas hingga saat ini. Sama halnya terjadi di provinsi provinsi Pulau Sumatera. Pemerintah telah melakukan berbagai macam upaya, baik dalam bentuk regulasi atau pun dalam bentuk anggaran untuk mempersempit ketimpangan. Akan tetapi, hingga saat ini upaya tersebut masih belum mampu secara maksimal untuk menurunkan ketimpangan pembangunan (Ridho & Achmad, 2022).

Ketimpangan pembangunan antara kabupaten kota di wilayah Sumatera sering menjadi suatu permasalahan yang serius dan apabila tidak diatasi serius oleh pemerintah dapat menimbulkan krisis yang kompleks di masyarakat dalam hal ini seperti permasalahan kependudukan, ekonomi, sosial dan politik dampak ini dapat merugikan dalam proses pembangunan yang ingin di capai dalam suatu wilayah. Adanya ketimpangan antar wilayah kabupaten kota di Sumatera berarti terdapat wilayah yang maju dan terbelakang yang dikarenakan oleh perbedaan pada beberapa sektor unggulan (Hidayat, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian Jumlah Penduduk dan Tingkat Pengangguran Terbuka Tidak berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan, Namun Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, dan pendidikan memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Tinggi suatu PDRB perkapita suatu daerah akan menggambarkan keberhasilan pada suatu provinsi tersebut dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada dimiliki pada setiap masing provinsi. Dengan bertumbuhnya nilai PDRB perkapita pada suatu daerah, maka jumlah tingkat kesejahteraan yang ada di masyarakat akan tercipta dengan begitu tingkat ketimpangan pendapatan yang ada di suatu daerah dapat berkurang. Untuk daerah memiliki sektor strategisnya masing-masing dalam meningkatkan jumlah PDRB perkapita pada setiap daerah. Namun sektor industry pertanian akan berperan penting terhadap struktur ekonomi yang ada di provinsi sumatera. Sektor industry pertanian menjadi pusat pertumbuhan yang ada di sumatera dengan banyaknya industry pertanian yang ada di Pulau Sumatera (Wasthutatya, 2022).

Angka rata rata lama sekolah dapat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap terjadinya ketimpangan pendapatan Artinya, meningkatnya Rata Rata Lama Sekolah akan memberikan penurunan pula pada indeks williamson dan begitu juga sebaliknya Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Wasthutatya, 2022) dan (Nemati & Hosseinidoust, 2018). Menurut Dai et al.,(2023) menyatakan bahwa proses pendidikan dalam mempengaruhi distribusi pendapatan, melalui peningkatan pengetahuan dan keahlian dalam bekerja. Hal tersebut akan menghasilkan pergeseran dari pekerja bergaji rendah dengan pekerja tidak terampil menjadi pekerja bergaji tinggi yang terampil. Pergeseran ini akan menghasilkan tingkat pendapatan yang lebih tinggi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas penulis menyimpulkan beberapa kesimpulan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Rata-rata *Gini Ratio* provinsi di pulau Sumatera masih berada di bawah angka 0,5 dan pada Indeks kemiskinan provinsi Aceh menjadi provinsi dengan indeks kemiskinan cukup tinggi.
2. Jumlah Penduduk dan Tingkat Pengangguran Terbuka Tidak berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan, Namun Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, dan pendidikan memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan mampu memberikan kebijakan yang komperhensif dalam menyelesaikan kasus kemiskinan di pulau Sumatera
2. Pemanfaatan dan memaksimalkan potensi sumber daya alam penting untuk dilakukan mengingat pulau Sumatera memiliki banyak potensi namun belum dimanfaatkan secara optimal

DAFTAR PUSTAKA

- Dai, S. I. S., Canon, S., & Bauty, D. O. (2023). Analisis pengaruh rls, pengeluaran perkapita, uhh, dan tingkat kemiskinan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di kbi dan kti. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 6(1), 535–544.
- Ghozali, I. (2020). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Badan Penerbit UNDIP.
- Hidayat, R. Al. (2020). Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Teknologi Informasi Akuntansi*, 1(2).
- Murialti, N. (2020). Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Sumatera Dengan Regresi Data Panel Tahun 2015-2019. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 10(2).
- Nemati, M., & Hosseinidoust, S. E. (2018). *THE EFFECT OF EDUCATION ON INCOME INEQUALITY*. 14(2), 61–78.
- Palupi, R. S., & Hendiarto, S. (2018). Kebijakan Hutang , Profitabilitas dan Kebijakan Dividen Pada Nilai Perusahaan Properti & Real Estate. *Jurnal Ecodemica*, 2(2), 177–185.
- Ridho, M., & Achmad, E. (2022). *Analisis ketimpangan pembangunan wilayah antar provinsi di Pulau Sumatera*. 11(1), 47–58.
- Todaro, Michael P, 2003, *Economic Development*, Eight Edition, Pearson Education Limited, Eidenburg Gate, Harlow, Essex, England Tarigan, R. 2004. *Ekonomi Regional, Teori dan Alikasi*. PT.Bumi Aksara, Jakarta.
- Wasthutatya, Y. (2022). *ANALISIS KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTARPROVINSI DI PULAU SUMATERA 2012-2021*. UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA.
- Yeniwati. (2013). KETIMPANGAN EKONOMI ANTAR PROVINSI DI SUMATERA. *Jurnal Kajian Ekonomi*, II(03).

LAMPIRAN

Data Penelitian

Tahun	Provinsi	GINI	TPT	PE	PND	Pendidikan
2012	Aceh	0.341	9.06	3.09	4715108	8.36
	Sumatera Utara	0.331	6.28	6.45	1340820	8.72
	Sumatera Barat	0.335	6.65	6.31	5000184	8.27
	Riau	0.383	4.37	3.76	5879109	8.34
	Jambi	0.359	3.20	7.03	3169814	7.69
	Sumatera Selatan	0.397	5.66	5.98	7714326	7.5
	Bengkulu	0.360	3.62	6.83	1783734	8.01
	Lampung	0.356	5.20	6.25	7835308	7.3
	Kep. Bangka Belitung	0.311	3.43	5.7	1286551	7.25
	Kep. Riau	0.393	5.08	7.63	1805089	9.58
2013	Aceh	0.331	10.12	2.06	4811133	8.44
	Sumatera Utara	0.328	6.45	6.08	13590250	8.79
	Sumatera Barat	0.351	7.02	6.08	5066476	8.28
	Riau	0.393	5.48	2.48	6033268	8.38
	Jambi	0.327	4.76	6.7	3317034	7.8
	Sumatera Selatan	0.375	4.84	5.47	7828740	7.53
	Bengkulu	0.372	4.61	6.07	1814435	8.09
	Lampung	0.356	5.69	5.98	7932132	7.32
	Kep. Bangka Belitung	0.307	3.65	5.22	1315123	7.32
	Kep. Riau	0.380	5.63	7.11	1861373	9.63
2014	Aceh	0.337	9.02	1.6	4906835	8.71
	Sumatera Utara	0.310	6.23	5.23	13766851	8.93
	Sumatera Barat	0.332	6.50	5.88	5131882	8.29
	Riau	0.379	6.56	2.71	6188442	8.47
	Jambi	0.342	5.08	7.9	3344421	7.92
	Sumatera Selatan	0.381	4.96	4.68	7941495	7.66
	Bengkulu	0.355	3.47	5.48	1844846	8.28
	Lampung	0.331	4.79	5.8	8026191	7.48
	Kep. Bangka Belitung	0.295	5.14	4.68	1343881	7.35
	Kep. Riau	0.437	6.69	7.32	1917415	9.64
2015	Aceh	0.339	9.93	0.7	5001953	8.77
	Sumatera Utara	0.326	6.71	5.10	13937797	9.03
	Sumatera Barat	0.319	6.89	5.53	5196289	8.42
	Riau	0.336	7.83	0.22	6344402	8.49
	Jambi	0.344	4.34	4.20	3402052	7.96
	Sumatera Selatan	0.334	6.07	4.42	8052315	7.77

	Bengkulu	0.371	4.91	5.14	1874925	8.29
	Lampung	0.352	5.14	5.13	8117268	7.56
	Kep. Bangka Belitung	0.275	6.29	4.08	1372813	7.46
	Kep. Riau	0.339	6.20	6.02	1973043	9.65
2016	Aceh	0.341	7.57	3.03	5096248	8.86
	Sumatera Utara	0.312	5.84	5.18	14102911	9.12
	Sumatera Barat	0.312	5.09	5.27	5259528	8.59
	Riau	0.347	7.43	2.18	6500971	8.59
	Jambi	0.346	4.00	4.37	3458926	8.07
	Sumatera Selatan	0.362	4.31	5.03	8160901	7.83
	Bengkulu	0.354	3.30	5.29	1904832	8.37
	Lampung	0.358	4.62	5.15	8205141	7.63
	Kep. Bangka Belitung	0.288	2.60	4.11	1401827	7.62
	Kep. Riau	0.352	7.69	4.98	2028169	9.67
2017	Aceh	0.329	6.57	4.02	5189466	9.98
	Sumatera Utara	0.335	5.60	5.12	14262147	9.25
	Sumatera Barat	0.312	5.58	5.30	5321489	8.72
	Riau	0.325	6.22	2.66	6657911	8.76
	Jambi	0.334	3.87	4.64	3515017	8.15
	Sumatera Selatan	0.365	4.39	5.51	8266983	7.99
	Bengkulu	0.349	3.74	4.99	1934301	8.47
	Lampung	0.333	4.33	5.16	8289577	7.79
	Kep. Bangka Belitung	0.276	3.78	4.47	1430865	7.78
	Kep. Riau	0.359	7.16	2.01	2082694	9.79
2018	Aceh	0.318	6.34	4.06	5281314	9.09
	Sumatera Utara	0.311	5.55	5.18	14415391	9.34
	Sumatera Barat	0.305	5.66	5.14	5382077	8.76
	Riau	0.347	5.98	2.35	6814909	8.92
	Jambi	0.335	3.73	4.71	3570272	8.23
	Sumatera Selatan	0.341	4.27	6.04	8391489	8
	Bengkulu	0.355	3.35	4.99	1963304	8.61
	Lampung	0.331	4.04	5.25	8370485	7.82
	Kep. Bangka Belitung	0.262	3.61	4.45	1459873	7.84
	Kep. Riau	0.337	8.04	4.56	2136521	9.81
2019	Aceh	0.318	6.17	4.01	5371532	9.18
	Sumatera Utara	0.315	5.39	5.22	14562549	9.45
	Sumatera Barat	0.307	5.38	5.01	5441197	8.92
	Riau	0.331	5.76	2.81	6971745	9.03
	Jambi	0.324	4.06	4.35	3624579	8.45
	Sumatera Selatan	0.339	4.53	5.69	8497196	8.18
	Bengkulu	0.329	3.26	4.95	1991802	8.73
	Lampung	0.331	4.03	5.26	8447737	7.92
	Kep. Bangka Belitung	0.262	3.58	3.32	1488792	7.98

	Kep. Riau	0.337	7.50	4.83	2189653	9.99
2020	Aceh	0.319	6.59	-0.4	5274871	9.33
	Sumatera Utara	0.314	6.91	-1.07	14703532	9.54
	Sumatera Barat	0.301	6.88	-1.61	5534472	8.99
	Riau	0.321	6.32	-1.13	6394087	9.14
	Jambi	0.316	5.13	-0.51	3677894	8.55
	Sumatera Selatan	0.338	5.51	-0.11	8467432	8.24
	Bengkulu	0.323	4.07	-0.02	2019803	8.84
	Lampung	0.320	4.67	-1.66	9007848	8.05
	Kep. Bangka Belitung	0.257	5.25	-.2.29	1455678	8.06
	Kep. Riau	0.334	10.34	-.3.80	2064198	10.12
2021	Aceh	0.323	6.30	2.08	5333733	9.77
	Sumatera Utara	0.313	6.33	2.61	14936148	9.88
	Sumatera Barat	0.300	6.52	3.29	5580232	9.46
	Riau	0.327	4.42	3.36	6493603	9.52
	Jambi	0.315	5.09	3.69	3585132	9.03
	Sumatera Selatan	0.340	4.98	3.58	8550849	8.78
	Bengkulu	0.321	3.65	3.27	2032942	9.26
	Lampung	0.314	4.69	2.77	9081792	8.56
	Kep. Bangka Belitung	0.247	5.03	5.05	1473165	8.54
	Kep. Riau	0.339	9.91	3.43	2055278	10.38
2022	Aceh	0.291	6.17	4.02	5407855	9.79
	Sumatera Utara	0.326	6.16	4.73	15372437	9.99
	Sumatera Barat	0.292	6.28	4.36	5640629	9.51
	Riau	0.323	4.37	4.55	6614384	9.54
	Jambi	0.335	4.59	5.13	3631198	9.07
	Sumatera Selatan	0.330	4.63	5.23	8657008	8.82
	Bengkulu	0.315	3.59	4.31	2060092	9.28
	Lampung	0.313	4.52	4.28	9176546	8.61
	Kep. Bangka Belitung	0.255	4.77	4.40	1494621	8.57
	Kep. Riau	0.325	8.23	5.09	2118239	10.46

OUTPUT PENELITIAN

Dependent Variable: GINI
 Method: Panel Least Squares
 Date: 10/03/23 Time: 22:57
 Sample: 2012 2022
 Periods included: 11
 Cross-sections included: 10
 Total panel (balanced) observations: 110

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.333614	0.033993	9.814223	0.0000
PND	2.84E-10	7.50E-10	0.378975	0.7055
TPT	0.004961	0.002090	2.373693	0.0194
PE	0.004509	0.001348	3.343951	0.0011
PENDIDIKAN	-0.005790	0.004133	-1.400935	0.1642
Root MSE	0.028218	R-squared		0.123999
Mean dependent var	0.331191	Adjusted R-squared		0.090627
S.D. dependent var	0.030287	S.E. of regression		0.028882
Akaike info criterion	-4.206817	Sum squared resid		0.087587
Schwarz criterion	-4.084068	Log likelihood		236.3749
Hannan-Quinn criter.	-4.157029	F-statistic		3.715702
Durbin-Watson stat	0.502205	Prob(F-statistic)		0.007197

Dependent Variable: GINI				
Method: Panel Least Squares				
Date: 10/03/23 Time: 22:58				
Sample: 2012 2022				
Periods included: 11				
Cross-sections included: 10				
Total panel (balanced) observations: 110				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.517636	0.034878	14.84149	0.0000
PND	-4.82E-11	1.29E-09	-0.037254	0.9704
TPT	-0.000550	0.001819	-0.302100	0.7632
PE	0.002238	0.000891	2.511177	0.0137
PENDIDIKAN	-0.022274	0.003423	-6.507930	0.0000
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
Root MSE	0.014800	R-squared	0.759015	
Mean dependent var	0.331191	Adjusted R-squared	0.726382	
S.D. dependent var	0.030287	S.E. of regression	0.015843	
Akaike info criterion	-5.333815	Sum squared resid	0.024095	
Schwarz criterion	-4.990117	Log likelihood	307.3598	
Hannan-Quinn criter.	-5.194409	F-statistic	23.25888	
Durbin-Watson stat	1.801132	Prob(F-statistic)	0.000000	

Dependent Variable: GINI				
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)				
Date: 10/03/23 Time: 22:58				
Sample: 2012 2022				
Periods included: 11				
Cross-sections included: 10				
Total panel (balanced) observations: 110				
Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.497912	0.034735	14.33474	0.0000
PND	4.19E-11	1.17E-09	0.035772	0.9715
TPT	0.000278	0.001756	0.158480	0.8744
PE	0.002508	0.000878	2.857857	0.0051
PENDIDIKAN	-0.020707	0.003316	-6.244936	0.0000
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.030075	0.7828
Idiosyncratic random			0.015843	0.2172
Weighted Statistics				
Root MSE	0.015494	R-squared	0.403943	
Mean dependent var	0.051951	Adjusted R-squared	0.381237	
S.D. dependent var	0.020161	S.E. of regression	0.015859	
Sum squared resid	0.026407	F-statistic	17.78944	
Durbin-Watson stat	1.614250	Prob(F-statistic)	0.000000	
Unweighted Statistics				
R-squared	-0.145269	Mean dependent var	0.331191	
Sum squared resid	0.114510	Durbin-Watson stat	0.372260	

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	28.107637	(9,96)	0.0000
Cross-section Chi-square	141.969756	9	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: GINI

Method: Panel Least Squares

Date: 10/03/23 Time: 23:37

Sample: 2012 2022

Periods included: 11

Cross-sections included: 10

Total panel (balanced) observations: 110

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.333614	0.033993	9.814223	0.0000
PND	2.84E-10	7.50E-10	0.378975	0.7055
TPT	0.004961	0.002090	2.373693	0.0194
PE	0.004509	0.001348	3.343951	0.0011
PENDIDIKAN	-0.005790	0.004133	-1.400935	0.1642
Root MSE	0.028218	R-squared		0.123999
Mean dependent var	0.331191	Adjusted R-squared		0.090627
S.D. dependent var	0.030287	S.E. of regression		0.028882
Akaike info criterion	-4.206817	Sum squared resid		0.087587
Schwarz criterion	-4.084068	Log likelihood		236.3749
Hannan-Quinn criter.	-4.157029	F-statistic		3.715702
Durbin-Watson stat	0.502205	Prob(F-statistic)		0.007197

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	4.211686	4	0.3781

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
PND	-0.000000	0.000000	0.000000	0.8705
TPT	-0.000550	0.000278	0.000000	0.0814
PE	0.002238	0.002508	0.000000	0.0812
PENDIDIKAN	-0.022274	-0.020707	0.000001	0.0647

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	203.4846 (0.0000)	0.599919 (0.4386)	204.0845 (0.0000)
Honda	14.26480 (0.0000)	0.774544 (0.2193)	10.63442 (0.0000)
King-Wu	14.26480 (0.0000)	0.774544 (0.2193)	10.88185 (0.0000)
Standardized Honda	17.66921 (0.0000)	1.297286 (0.0973)	9.338747 (0.0000)
Standardized King-Wu	17.66921 (0.0000)	1.297286 (0.0973)	9.657315 (0.0000)
Gourieroux, et al.	--	--	204.0845 (0.0000)

	GINI	PND	TPT	PE	PENDIDIKAN
GINI	1.000000	0.040302	0.072859	0.270376	-0.099296
PND	0.040302	1.000000	0.108556	-0.040898	0.063526
TPT	0.072859	0.108556	1.000000	-0.361066	0.494129
PE	0.270376	-0.040898	-0.361066	1.000000	-0.251201
PENDIDIKAN	-0.099296	0.063526	0.494129	-0.251201	1.000000

Panel Period Heteroskedasticity LR Test

Equation: UNTITLED

Specification: GINI C PND TPT PE PENDIDIKAN

Null hypothesis: Residuals are homoskedastic

	Value	df	Probability
Likelihood ratio	8.335428	10	0.5961
LR test summary:			
	Value	df	
Restricted LogL	236.3749	105	
Unrestricted LogL	240.5426	105	